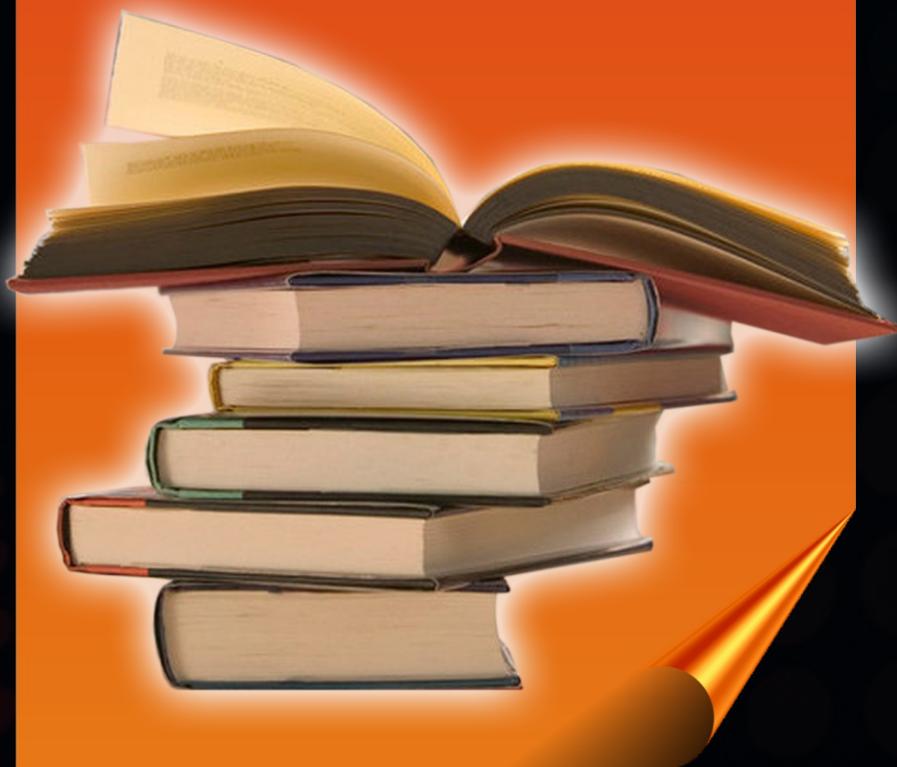


Dr. Putu Sudira, MP.

# Filosofi & Teori Pendidikan

Vokasi dan Kejuruan



# **F**ilosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang  
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982  
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbayak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

# **Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan**

**Dr. Putu Sudira, MP.**



# **Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan**

Cetakan 1, Oktober 2012

**Penulis:**

Dr. Putu Sudira, M.P.

**Editor:** Teguh Setyawan

**Tata Letak:** Yudiati

**Desain Cover:** Kuncoro W.D.

**Dicetak dan diterbitkan oleh:**

**UNY Press**

Jl. Affandi (Gejayan), Gg. Alamanda, Kompleks FT

Kampus Karangmalang, Yogyakarta

Telp. (0274) 589346

Email: [redaksi.unypress@gmail.com](mailto:redaksi.unypress@gmail.com)

ISBN 978-979-8418-80-8

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

100 hlm; 16 x 23 cm

# Daftar Isi

	Halaman
DAFTAR ISI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
BAB I Vokasinalisasi dan Definisi Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Indonesia .....	1
BAB II Filosofi Pendidikan Vokasi dan Kejuruan .....	16
BAB III Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan .....	26
BAB IV Asumsi-Asumsi Pendidikan Vokasi dan Kejuruan .....	37
BAB V Praktik Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Indonesia .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	71
Tentang Penulis .....	80
Indek .....	81



# Kata Pengantar

**K**ebutuhan akan teori-teori dan filosofi pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia semakin terasa dengan semakin berkembangnya studi pascasarjana pendidikan teknologi keju-ruan di beberapa daerah di Indonesia. Teori-teori dan filosofi pendidikan kejuruan dan vokasi sangat penting bagi pengembangan ilmu pendidikan kejuruan dimasa depan. Dengan adanya teori dan filosofi yang memadai, maka pengembangan kajian pendidikan kejuruan dan vokasi akan semakin terarah. Akhirnya praktik-praktik pendidikan vokasi dan kejuruan juga diharapkan menjadi semakin baik, benar, wajar, dan sesuai sasaran.

Buku ini disusun untuk memenuhi harapan para mahasiswa dan guru pendidikan kejuruan dan vokasi dalam memandang dan mempersepsikan proses vokasionalisasi di Indonesia. Harapannya setelah membaca buku ini, mereka dapat membangun pandangan baru yang lebih “*clear*” terhadap proses vokasionalisasi yang seharusnya terjadi di Indonesia. Buku ini disusun dalam 5 bab yaitu: Bab I tentang vokasionalisasi dan definisi pendidikan kejuruan dan vokasi; Bab II tentang filosofi pendidikan vokasi dan kejuruan; Bab III tentang teori pendidikan vokasi dan kejuruan; Bab IV tentang asumsi-asumsi pendidikan vokasi dan kejuruan; Bab V tentang praktik pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia. Semoga buku kecil dapat menginspirasi dan memberi wawasan serta manfaat baru bagi pembaca.

Yogyakarta, Oktober 2012  
Penulis,

# Bab 1

## **VOKASIONALISASI DAN DEFINISI PENDIDIKAN VOKASI DAN KEJURUAN INDONESIA**

Vokasionalisasi adalah proses pengenalan subyek-subyek praktis keduniakerjaan melalui kegiatan kunjungan industri, pemberian bimbingan kejuruan dan pemberian pengajaran dan pelatihan terapan kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Kita gunakan istilah vokasionalisasi yang mencakup makna kejuruanisasi. Pengenalan subyek-subyek praktis keduniakerjaan mencakup pengembangan kompetensi kejuruan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, *soft skill*, ketrampilan kerja, ketrampilan teknis, karir kejuruan, sistem penggajian, sistem kerja, keselamatan kerja, peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan dan sebagainya. Dalam bidang teknologi dan rekayasa bagaimana masyarakat semakin mengenal standar kompetensi konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi batu dan beton, gambar bangunan, furnitur, flumbing, sanitasi, survey, pemetaan, pembangkit tenaga listrik, distribusi dan transmisi tenaga listrik, instalasi listrik, otomasi industri, teknik pendingin, pabrikasi logam, pengelasan, pemesinan, pengecoran logam, perbaikan sepeda motor, perbaikan kendaraan ringan, perbaikan alat berat, perawatan dan perbaikan audio-video, mekatronika, dan sebagainya.

Dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, diperkenalkan standar kompetensi multi media, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, animasi, produksi siaran televisi, dan produksi siaran radio. Dalam bidang kesehatan dikenalkan kompetensi keperawatan kesehatan, keperawatan gigi, analisis kesehatan, farmasi, keperawatan sosial, dan mungkin juga kompetensi obat-obatan herbal. Dalam bidang seni dan kerajinan, subyek standar kompetensi lukis, patung, interior, landscaping,

kria, musik, tari, kerawitan, theater dan sebagainya perlu diperkenalkan dengan baik. Disamping itu subyek-subyek standar kompetensi dalam bidang boga, busana, kecantikan, agribisnis, agroindustri, administrasi, keuangan, dan perbankan juga penting diperkenalkan.

Tujuan utama vokasionalisasi adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan bimbingan kejuruan dengan perkembangan kebutuhan keduniakerjaan dalam mewujudkan Negara dan masyarakat sejahtera yang kompetitif dan berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan. Planet bumi ini bukan untuk satu generasi melainkan untuk anak cucu tanpa batas. Karenanya, vokasionalisasi tidak boleh terjebak hanya pada orientasi pasar yang sempit. Vokasionalisasi harus membangun masyarakat sejahtera sekarang dan masa depan tanpa batas waktu. Vokasionalisasi juga membawa visi misi membangun dan menjaga jagat raya beserta seluruh isinya menjadi "*hamemayu ayuning bhawana*". Dunia yang sudah "*ayu*" atau baik diperbaiki kembali secara terus menerus agar tambah baik. Vokasionalisasi tidak boleh terjebak pada kebutuhan sesaat yang sempit apalagi mengancam kelangsungan hidup. Ini pesan moral vokasionalisasi masyarakat melalui pendidikan vokasi dan kejuruan. Pendidikan kejuruan dan vokasi tidak semata mata untuk memperoleh kesenangan, kemudahan, kenyamanan, keamanan sementara, tetapi untuk tujuan yang lebih jauh yaitu bahagia dan damai hidup bersama di planet bumi ini.

Seberapa pentingkah pendidikan vokasi dan kejuruan harus didefinisikan? Mengapa sesuatu..... apakah itu benda, orang, aktivitas, program, variabel, peristiwa perlu didefinisikan? Apa perlunya pendidikan vokasi didefinisikan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan menarik. Definisi adalah suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal, apakah itu benda, orang, aktivitas, program, variabel, atau peristiwa. Definisi biasanya lebih kompleks dari arti, makna, atau pengertian suatu hal. Dalam sebuah program pendidikan definisi suatu nama atau istilah harus sesuai dengan isi, misi, dan visi program pendidikan itu sendiri. Pada saat definisi tidak sesuai dengan isi, misi, dan visi maka kita akan menjadi bingung dan kehilangan arah. Oleh karena itu, pendefinisian pendidikan vokasi dan kejuruan diperlukan untuk menyesuaikan dengan isi, misi, dan visi dari

pendidikan tersebut. Definisi membangun pemahaman yang benar terhadap sebuah nama pendidikan vokasi. Dengan definisi yang jelas akan terjadi kesamaan pemahaman, kesesuaian isi, misi, dan tujuan pendidikan kejuruan dan vokasi. Kesesuaian isi, visi, dan misi menjadi penting untuk definisi sebuah nama.

Pendidikan vokasi diberbagai negara telah mengalami fase mutasi panjang. Kendati telah mengalami fase perkembangan yang cukup panjang pendidikan vokasi terus saja menarik untuk didefinisikan dan direformulasi kembali termasuk diredesain. Dalam arti, isinya terus disesuaikan dan definisinya pun dikembangkan dan disesuaikan dengan misi dan visi pendidikan vokasi suatu bangsa atau negara. Pendidikan kejuruan dan vokasi memerlukan formulasi yang aktual dan kontekstual berdasarkan konteks waktu dan ruang yang ada. Sebelum sampai kepada definisi pendidikan vokasi dan kejuruan versi Indonesia, ada baiknya ditinjau beberapa definisi yang ada diberbagai negara dan definisi dari beberapa ahli pendidikan kejuruan dunia.

Amerika Serikat adalah negara yang paling pertama mengembangkan pendidikan vokasi sehingga teknologi di negara adi daya itu berkembang dengan sangat pesat. Di Amerika Serikat pun kemudian bermunculan ahli-ahli pendidikan vokasi yang sangat intens meneliti dan mengembangkan pendidikan vokasi baik dalam tataran praktis, konsep, teori, dan filosofi. Belakangan sejak Amerika Serikat tersaingi perkembangan teknologi ruang angkasanya oleh Uni Sovyet, lalu Amerika Serikat melakukan perubahan besar-besaran arah kebijakan pendidikannya. Amerika Serikat kemudian lebih menekankan program pendidikannya pada riset dasar dan pengembangan namun mengurangi riset-riset terapan. Amerika Serikat lebih mendorong pendidikan umum dibandingkan pendidikan vokasinya. Riset yang banyak dikembangkan adalah riset untuk teknologi tinggi khususnya dalam ruang angkasa dan persenjataan. Riset terapan untuk teknologi elektronik, elektrik, otomotif, komputer, periferiferal, dan komunikasi kurang dijadikan fokus kebijakan. Akhirnya riset terapan dan pengembangan industri kreatif bergeser ke Eropa seperti Jepang, Jerman, dan Taiwan. Untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan makanan olahan justru berkembang di Asia khususnya

Thailand dan juga Australia dan Selandia Baru. Taiwan saat ini adalah Negara yang paling banyak menguasai pasar periperal dan komputer dunia, sedangkan pasar pertanian dan perkebunan semakin banyak dikuasai oleh Thailand. Kondisi ini kemudian membuat Amerika Serikat menjadi kalah dalam teknologi komputer dan komunikasi termasuk teknologi pertaniannya. Bahkan, Amerika Serikat juga mengimpor produk-produk teknologi hasil dari pendidikan vokasi. Ini adalah gambaran nyata kompetisi antar Negara dalam memperebutkan pengakuan dan kesejahteraan masyarakat bangsanya khususnya dalam bidang ekonomi. Pendidikan vokasi dan kejuruan dijadikan benteng dan penggerak ekonomi bangsa. Motif pendidikan vokasi dan kejuruan memang kuat pada pertumbuhan target-target ekonomi.

Secara historis di negara maju dan juga di negara berkembang pendidikan kejuruan lahir dari kebutuhan manusia untuk peningkatan kompetensi teknis dan kompetensi kepribadian sebagai bekal peningkatan posisi ekonominya di dalam masyarakat. Kaum tukang bangunan sebagai contoh kasus akan dipanggil dan diberi pekerjaan jika kompetensi teknis atau profesi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga mungkin kompetensi lintas budayanya baik. Tukang bangunan dipanggil dan dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mengerjakan berbagai pekerjaan seperti memasang pondasi, menganyam besi struktur, memasang bata dinding, memasang kusen, menyambung kayu, memasang rangka atap, plapon, memasang genting, memasang keramik lantai, keramik bak kamar mandi, memasang instalasi saluran air bersih, air kotor, dan seterusnya. Melalui kerja dengan menerapkan kompetensi teknis atau profesi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi lintas budaya tukang bangunan secara ekonomi mendapatkan penghasilan. Demikian juga dengan tukang servis elektronik seperti radio, televisi, komputer, DVD player, power amplifier, dan sebagainya.

Ada banyak istilah dan pengertian tentang pendidikan kejuruan dan vokasi di berbagai negara. Di Amerika Serikat digunakan istilah *Career and Technical Education* (CTE), *Vocational and Technical Education* (VTE), dan di tingkat menengah disebut *Career Centre* (CC). Dari nama ini jelas sekali Amerika Serikat sudah mengarahkan pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sebuah pendidikan karir bagi masyarakatnya.

Artinya, pendidikan kejuruan atau vokasi tidak lagi sekedar sebagai pendidikan yang menyiapkan lulusannya hanya untuk bekerja atau menjadi pekerja biasa-biasa saja. Amerika Serikat telah mengorientasikan pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sebuah pendidikan yang jelas jenjang dan jenis karirnya. Bila pendidikan vokasi jelas jenis dan jenjang kariernya, pendidikan vokasi akan menjadi incaran masyarakat seperti pendidikan dokter, pendidikan kemiliteran, pendidikan kepolisian, dan beberapa pendidikan kedinasan di Indonesia. Ini penting bagi kelangsungan dan jaminan hidup seseorang. Pengembangan pendidikan vokasi di Amerika Serikat betul-betul sudah memperhatikan arah dan jenis karir yang ada pada setiap lapangan pekerjaan. Ini artinya lembaga pendidikan kejuruan dirancang dan dikembangkan sebagai pusat pengembangan karir bagi masyarakatnya. Pusat pengembangan karir menjadi bagian penting dari pengembangan kualitas sumber daya insani yang mampu berkompetisi secara internasional. Pendidikan vokasi sebagai pusat pengembangan karir bisa betul-betul memberi dan memenuhi jaminan dan harapan masyarakat untuk hidup sejahtera berkelanjutan.

Istilah atau nama *Further Education and Training* (FET) digunakan di Inggris dan Afrika Selatan. Seperti halnya di Brunei Darusalam, pendidikan kejuruan atau vokasi merupakan pendidikan lanjut yang ditujukan dan disiapkan bagi anak yang sudah cukup dewasa untuk memulai memasuki dunia kerja. Pendidikan vokasi termasuk dalam *adult education*. Pendidikan vokasi mulai disesuaikan dengan tingkat umur dan kesiapan anak untuk mengapresiasi pekerjaan. Apresiasi terhadap pekerjaan penting maknanya bagi peserta didik dan lulusan satuan pendidikan vokasi. Kematangan dan kedewasaan peserta didik dalam pendidikan vokasi dan kejuruan sangat penting dan perlu mendapat kajian yang cukup. Pendidikan kejuruan atau vokasi tanpa membangun dan mewujudkan apresiasi anak terhadap pekerjaan akan sia-sia dan in-efisien, karena tujuan pendidikan vokasi dan kejuruan adalah untuk membangun kompetensi kerja dan produktivitas lulusan.

Kemudian untuk di Asia Tenggara digunakan istilah *Vocational and Technical Education and Training* (VTET). Negara-negara Asia Tenggara menekankan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan. VTET lebih

menekankan dua hal yang berbeda antara pendidikan yang berbau teori dan pengembangan pengetahuan dan pelatihan yang berbau ketrampilan. Pendidikan memuat materi-materi umum yang bersifat normatif dan adaptif dan pelatihan memuat praktikum pengembangan skill motorik dari berbagai pekerjaan. Model itu lebih menekankan aspek-aspek ketrampilan atau skill motorik dibandingkan pengembangan karir secara terprogram. Istilah *Vocational Education and Training* (VET) dan *Vocational and Technical Education* (VTE) digunakan di Australia. Pendidikan vokasi di Australia juga sangat maju. Perkembangan pendidikan vokasi di Australia sangat didukung oleh lembaga-lembaga risetnya yang sangat intens didalam melakukan kajian-kajian dan pengembangan pendidikan vokasi. National Centre for Vocational Education Research (NCVER) adalah salah satu lembaga riset nasional Australia yang sangat profesional dalam melakukan kajian pengembangan dan publikasi pendidikan vokasi di Australia.

Pendidikan vokasi dan kejuruan telah mengalami masa dan sejarah perkembangan cukup lama. Pendidikan kejuruan yang umumnya di beberapa negara disebut juga pendidikan vokasi mengalami puncak popularitas sembilan puluh lima tahun lalu pada saat Smith-Hughes pada tahun 1917 mendefinisikan "*vocational education was training of less than college grade to fit for useful employment*" (Thompson, 1973:107). Pendidikan vokasi adalah *training*/pelatihan dibawah perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan yang ada. Pada waktu itu pendidikan vokasi fokus pada pelatihan-pelatihan pada jenjang pendidikan menengah yang mestinya disesuaikan dengan kebutuhan jenis lapangan kerja dan jenjang pekerjaan yang ada. Pada waktu itu pendidikan vokasi masih bersifat sederhana dan dilaksanakan pada pendidikan menengah setingkat SMK dan SMP. Pengalaman sejarah pendidikan kejuruan di Indonesia juga demikian. Sampai sekarang Indonesia masih tetap menyelenggarakan pendidikan kejuruan di bawah perguruan tinggi pada SMK dan MAK. Dulu di Indonesia ada pendidikan kejuruan pada tingkat SMP dengan nama Sekolah Teknik dan pada tingkat menengah atas dengan nama STM, SMEA, SPMA dan sebagainya. Kualifikasi tenaga kerja pada waktu itu cukup dan bisa dipenuhi melalui pelatihan pada tingkat sekolah menengah pertama.

Dengan ijazah ST seseorang pada waktu itu sudah diterima bekerja. Tentunya kondisinya sekarang sudah berubah dimana untuk bisa bekerja minimal ijazah harus pada level pendidikan menengah SMK/MAK atau SMA.

Pengertian pendidikan vokasi sebagai pelatihan memang maknanya agak rancu dan tidak menyeluruh. Pendidikan vokasi seharusnya mencakup kajian umum dan juga pengembangan ketrampilan melalui berbagai pelatihan-pelatihan. Pendidikan vokasi hanya sebagai pelatihan/*training* seakan-akan terbatas sebagai kursus ketrampilan non formal. Pendidikan vokasi dan *training* vokasi adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan secara konsep harusnya lebih bersifat generik dan berjenjang, sedangkan pelatihan lebih bersifat spesifik dan juga dapat berjenjang. Untuk itu di bidang kejuruan dan vokasi sering digunakan konsep diklat atau pendidikan dan pelatihan. Pendidikan mencakup ranah teoritis dan konsep-konsep pengembangan termasuk materi normatif seperti Agama, Moral Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, seni budaya disamping materi adaptif seperti Bahasa Asing, matematika, IPA, Fisika, Kimia, IPS, Kewirausahaan. Pelatihan mencakup ranah produktif yang banyak memberi bekal ketrampilan baik di bengkel maupun di laboratorium dan juga di dunia usaha industri.

Di Amerika Serikat pada tahun 1963 pendidikan vokasi didefinisikan sebagai berikut:

*Vocational or technical training or retraining which given in schools or classes under public supervision and control or under contract with a State Board or local education agency, and is conducted as part of program designed to fit individuals for gainful employment as semi-skilled or skilled worker or technicians in recognized occupations” (Thompson, 1973:109).*

Definisi dari Thompson di atas membangun pengertian bahwa pendidikan vokasi adalah pelatihan teknis atau pelatihan kembali di sekolah atau di kelas yang mendapat supervisi atau pengawasan dan pengendalian oleh badan atau agen pendidikan lokal semacam dinas pendidikan. Pendidikan vokasi dan kejuruan tanpa pelatihan teknis adalah tidak mungkin. Pendidikan vokasi dan kejuruan akan dapat membangun ketrampilan peserta didik bilamana dilakukan pengulangan-pengulangan. Melalui pengu-

langan kembali seseorang dapat meningkatkan dan memperbaiki ketrampilannya. Pelatihan kembali juga dapat diartikan dengan pemberian pelatihan baru bagi pekerja yang sudah aktif bekerja. Pelatihan kembali diperlukan untuk peningkatan kompetensi teknis para pekerja aktif.

Pendidikan kejuruan dan vokasi sangat perlu disupervisi. Supervisi pendidikan kejuruan dan vokasi diarahkan untuk meningkatkan segala bentuk proses koordinasi penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi dan pendidikan berbasis dunia kerja. Melalui supervisi, kepala sekolah dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinannya dalam membangun jejaring kerjasama keluar bersama dunia usaha dan dunia industri dan kedalam bersama para guru dan instruktur dan teknisi. Supervisi dapat meningkatkan pengalaman dan pendalaman guru dalam mengajar dan melatih siswa sehingga ada upaya-upaya kreatif dan produktif yang berkembang di sekolah. Tumbuhnya iklim dan budaya wirausaha melalui bengkel dan laboratorium serta *teaching factory*. Ini semua diperuntukkan sebagai upaya menganalisis dan merumuskan kembali situasi dan lingkungan belajar dan berlatih yang menyenangkan.

Pimpinan lembaga pendidikan kejuruan dan vokasi harus melakukan kerjasama baik dengan asosiasi profesi, dunia usaha, dunia industri. Supervisi dan kerjasama dengan berbagai lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi program-program pendidikan kejuruan dan vokasi dengan dunia kerja. Supervisi pendidikan kejuruan dan vokasi dapat menyesuaikan program pendidikan dengan perkembangan teknologi, peralatan, dan sistem baru. Pendidikan vokasi dilaksanakan sebagai bagian dari program yang didesain untuk mencocokkan individu atau seseorang dengan pekerjaan. Melalui pendidikan kejuruan dan vokasi, seseorang dapat mengembangkan bakat, minatnya pada bidang tertentu untuk berlatih menguasai kompetensi dan setelah lulus bisa memasuki dunia kerja yang sesuai.

Pendidikan vokasi melakukan pelatihan yang bersifat semi skill atau skill penuh bagi pekerja atau teknisi dalam berbagai pekerjaan yang diakui atau legal. Yang menarik dari pernyataan ini ada kata diakui dan legal. Artinya, legalitas suatu jenis pekerjaan menjadi sangat penting untuk dijadikan perhatian

dalam pendidikan vokasi dan kejuruan. Lembaga pendidikan vokasi tidak diperkenankan melakukan pelatihan-pelatihan untuk suatu pekerjaan yang tidak diakui atau tidak direkognisi. Misalnya, pekerjaan menjual narkoba karena mahir menguasai ilmu pemasaran gelap, mencetak uang palsu karena menguasai software desain grafis, membobol bank karena mahir membuka dokumen data komputer melalui internet, membongkar ATM karena lihai menggunakan mesin las. Semua ini sangat penting sebagai bagian dari moral pendidikan kejuruan.

Lima tahun kemudian pada tahun 1968 pengertian pendidikan vokasi di Amerika Serikat diamandemen dengan formulasi baru sebagai berikut:

*Vocational or technical training or retraining which given in schools or classes under public supervision and control or under contract with a State Board or local education agency and is conducted as part of program designed to prepare individuals for gainful employment as semi-skilled or skilled worker or technicians or sub-professionals in recognized occupations and in new and emerging occupation or to prepare individuals for employment in occupation which the Commissioner determines.....”* (Thompson, 1973:110).

Pengertian pendidikan vokasi sebelum dan setelah diamandemen menyatakan tiga hal yang sama yaitu pendidikan, pelatihan (*training*), dan pelatihan kembali (*retraining*). Pendidikan, pelatihan, dan pelatihan kembali memerlukan adanya supervisi dari masyarakat dan dikendalikan atau dibawah kontrak badan/lembaga atau agen pendidikan lokal setingkat dinas pendidikan. Agen-agen pendidikan kejuruan/vokasi sema-cam asosiasi profesi, asosiasi pekerja, ikatan alumni, komite sekolah, dinas pendidikan, praktisi, pimpinan industri, pimpinan bengkel, pengusaha dilibatkan secara aktif dalam pengembangan program kurikulum dan pembelajaran pelatihan dalam menyiapkan individu sebagai pekerja tangguh dalam menguasai skill dan semi skill kerja, atau menjadi teknisi dan profesionalis. Program pendidikan kejuruan dan vokasi harus selalu dekat dengan lapangan kerja, berpikir terus mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pekerjaan baru dan menyiapkan individu untuk lapangan pekerjaan atau jabatan baru. Pendidikan vokasi memer-

lukan supervisi dari masyarakat sehingga masyarakat pengguna pendidikan vokasi paham betul dengan program-program yang diselenggarakan oleh sekolah termasuk peluang-peluang kerja yang tersedia. Pendidikan vokasi bersifat generik dan masih bersifat terbuka untuk berbagai kemungkinan-kemungkinan pekerjaan. Pelatihan vokasi sudah bersifat mengkhusus untuk suatu ketrampilan atau kompetensi tertentu yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat atau dunia industri. Pelatihan kembali biasa dilakukan atau diberikan kepada pekerja yang sudah aktif bekerja untuk meningkatkan kinerja atau kemampuannya karena ada promosi jabatan, pengembangan sistem kerja, pemanfaatan peralatan baru. Pelatihan kembali memang selalu diperlukan pada saat seseorang atau pekerja dihadapkan pada teknologi baru, sistem baru, atau menerima promosi pada suatu pekerjaan atau jabatan baru di atasnya.

Pendidikan kejuruan merupakan bagian program yang dirancang untuk menyiapkan individu untuk pekerjaan yang menguntungkan sebagai pekerja semi trampil atau trampil penuh atau teknisi atau bagian dari profesionalis yang dibutuhkan dalam pekerjaan atau jabatan baik untuk jabatan baru atau jabatan/pekerjaan mendesak. Pendidikan kejuruan atau vokasi berhubungan dengan sistem persekolahan formal, sedangkan *training* berkaitan dengan pelatihan non formal bersertifikat baik untuk anak usia sekolah atau orang dewasa dan juga anak putus sekolah atau penganggur yang memerlukan ketrampilan untuk mencari pekerjaan (Hansen, R., 2009; Heinz, W.R., 2009; Ruth, K., 2009). *Retraining* adalah pelatihan kembali bagi pekerja untuk peningkatan kompetensi dirinya guna keperluan peningkatan/promosi jabatan atau mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik (Rojewski, J.W., 2009; Heinz, W.R., 2009; Pavlova, M., Maclean, R., 2009). Peningkatan pelaksanaan training terjadi jika persediaan jumlah pekerja tumbuh dengan pesat, pekerjaan juga berkembang dengan pesat, atau pengangguran naik secara signifikan. Pendidikan kejuruan membantu pemuda dan penganggur mendapatkan pekerjaan, mengurangi beban perguruan tinggi, menarik investasi luar negeri, menjamin pertumbuhan pendapatan karena peningkatan skill, memperkecil kesenjangan diantara kaum kaya dengan kaum miskin. Jadi, pendidikan dan latihan kejuruan diharapkan

dapat meningkatkan status sekaligus meningkatkan potensi kompetensi dan produktivitas (Ruth, K., 2009; Boreham, N. and Fischer, M.; 2009).

Pemerintah sebagai pengembang dan penggerak pendidikan kejuruan dan vokasi dalam kerangka penyiapan dan pengembangan sumber daya insani perlu membuat perencanaan yang baik dalam melaksanakan pelatihan dan pelatihan kembali baik bagi masyarakat pencari kerja maupun pekerja yang membutuhkan pengembangan ketrampilan lanjut. Ada perbedaan penekanan definisi pendidikan vokasi sebelum diamandemen dan sesudah diamandemen. Sebelum diamandemen pendidikan, pelatihan/*training*, *retraining* dirancang untuk mengepaskan (*to fit*) individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan. Pengepasaan (*to fit*) pendidikan dan pelatihan vokasi dengan jenis atau macam pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat menurut (Gill, Dar, & Fluitman, 2000; Boreham, N. and Fischer, M.; 2009) sangat sulit karena kebutuhan pekerjaan berubah cepat dan tidak mudah diprediksi. Perencanaan pendidikan dan pelatihan kejuruan dan vokasi dengan model pendekatan *to fit* akan efektif hanya jika lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi betul-betul memiliki kerjasama yang baik dengan lembaga, industri, atau dunia kerja pemakai lulusannya. Jika lembaga pendidikan kejuruan semacam SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) atau MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) atau lembaga pendidikan vokasi semacam Politeknik tidak memiliki hubungan kerjasama dalam melakukan penempatan lulusannya, maka program pendidikan kejuruan atau vokasi itu menjadi sangat tidak efisien. Karena pendidikan kejuruan dan vokasi dengan model pendekatan *to fit* menuntut adanya pelatihan-pelatihan spesifik yang sarat dengan kebutuhan berbagai jenis peralatan dan bahan praktik yang mahal harganya.

Sedangkan dalam definisi hasil amandemen pendidikan atau pelatihan vokasi dirancang untuk mempersiapkan (*to prepare*) individu mendapatkan pekerjaan. Definisi hasil amandemen memiliki makna lebih fleksibel dan adaptif yaitu sebuah pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi yang mampu menyiapkan lulusan untuk bekerja (Pavlova, M., 2009). Pendidikan kejuruan dan vokasi model *to prepare* lebih menekankan kemampuan lulusannya untuk bisa bekerja diberbagai institusi

atau lapangan kerja. Program pendidikan lebih diarahkan pada penguatan kompetensi-kompetensi dasar sehingga lulusannya lebih disiapkan untuk siap dilatih kembali untuk pekerjaan tertentu bukan siap kerja setelah lulus. Lalu diantara *to fit* dan *to prepare* manakah yang lebih baik? Jawabannya secara umum *to prepare* lebih baik dari *to fit*. Kondisi semacam sementara ini belum disadari dengan baik oleh para perencana dan pengembang pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia. Para pengembang pendidikan kejuruan termasuk masyarakat pengguna pendidikan kejuruan di Indonesia bersikukuh melaksanakan pendidikan kejuruan dengan pelatihan kejuruan yang sangat spesifik. Sementara itu banyak lulusan pendidikan kejuruan tidak memiliki ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Mencermati kondisi ini maka sangat perlu dilakukan pencerahan kepada para pimpinan, pengelola, guru atau pendidik di lingkungan pendidikan kejuruan untuk mempertimbangkan kembali model pendekatan pelatihan yang dilaksanakan di SMK/MAK saat ini.

Disamping itu Good dan Harris (1960) mendefinisikan "*vocational education is education for work-any kind of work which the individual finds congenial and for which society has need*". Pendidikan vokasi adalah pendidikan untuk bekerja dimana seseorang mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan atau cocok seperti harapan masyarakat pada umumnya. Pada saat jumlah lapangan pekerjaan terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja maka ketidakcocokan pekerjaan yang didapat dengan harapan pencari kerja akan selalu meningkat. Agar bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok maka masyarakat pengguna pendidikan kejuruan harus mengerti dan memahami dengan baik jenis-jenis lapangan kerja dan berbagai jenis atau bidang studi keahlian yang diselenggarakan di SMK. Masyarakat juga harus memahami jenis-jenis lapangan pekerjaan yang tersedia, trend perkembangan pekerjaan, kapasitas dan jumlah kebutuhan tenaga kerja baru.

Sejalan dengan tuntutan pendidikan vokasi yang selalu harus memperhatikan jenis dan bidang-bidang pekerjaan serta harapan masyarakat pencari kerja. Asosiasi Vokasi Amerika mendefinisikan pendidikan vokasi sebagai berikut:

*Vocational education as education designed to develop skills, abilities, understandings, attitudes, work habits, and appreciations needed by workers to enter and make progress in employment on useful and productive basis” (Thompson, 1973:111).*

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan ketrampilan, kemampuan/kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja, dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja dalam memasuki pekerjaan dan membuat kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan penuh makna dan produktif (Adhikary, P.K.,2005). Pertama-tama pendidikan kejuruan melakukan diklat pengembangan ketrampilan. Penguasaan ketrampilan untuk saat ini tidak cukup tanpa kecerdasan atau kecakapan termasuk personaliti. Banyak anak-anak trampil tidak bisa sukses karena tidak cakap/cerdas dalam bersosialisasi, bersikap, tidak mampu memahami persoalan baru yang terjadi, tidak memiliki jiwa pekerja keras, pesimis, tidak berani mengambil resiko, komitmen kerja rendah, tidak kreatif, tidak berorientasi pada tujuan masa depan. Kegagalan dan kesuksesan seseorang dalam kerja banyak ditentukan oleh kemampuan dan kapasitasnya dalam bersikap dan memandang masalah-masalah kerja dan pekerjaan. Untuk itu pendidikan kejuruan selain harus menguatkan ketrampilan keras (*hard skill*) juga harus mumpuni dalam pengembangan ketrampilan lunak (*soft skill*). Bahkan *soft skill* saat ini dan kedepan semakin kuat persentasenya dalam mendongkrak karir seseorang karena berbagai jenis ketrampilan keras semakin dibuat mudah dipelajari dengan menggunakan berbagai perangkat lunak komputer. Sejalan dengan pemikiran tersebut menurut Pavlova (2009) tradisi dari pendidikan kejuruan adalah menyiapkan siswa untuk sukses dalam karir dan pekerjaan. Jadi pendidikan kejuruan sebagai pendidikan untuk dunia kerja adalah tradisinya pendidikan kejuruan itu sendiri.

Di Indonesia pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Indonesia menempatkan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk menyiapkan lulusan bekerja atau melanjutkan kejenjang lebih tinggi atau bekerja mandiri berwirausaha. Sasaran dan

tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia diatur dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 3 sebagai pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. Tujuan ini mengandung tiga aspek pokok, yaitu dimilikinya kompetensi kerja, karakter (kepribadian dan ahklak mulia) untuk hidup mandiri (*life skills*), dan berkembangnya karir melalui pendidikan kejuruan. Pernyataan ini tegas sekali bahwa kompetensi kerja dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan tidak cukup bagi seorang pribadi pendidikan kejuruan. Kompetensi kerja harus didukung dengan karakter kejuruan yang baik berupa kepribadian kerja dan ahklak hidup seimbang harmonis antar sesama, lingkungan, dan berke-Tuhan-an. Jelas sekali PP 19 mengamatkan dilaksanakannya pendidikan karakter dalam pendidikan kejuruan.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan Pasal 16 UU Perguruan Tinggi. Dari sejumlah definisi pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan terbentuknya ketrampilan, kecakapan, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha/industri, diawasi oleh masyarakat dunia usaha dan industri dalam kontrak dengan lembaga-lembaga asosiasi profesi serta berbasis produktif. Apresiasi terhadap pekerjaan sebagai akibat dari adanya kesadaran bahwa orang hidup butuh bekerja merupakan bagian pokok dari pendidikan kejuruan dan vokasi. Pendidikan kejuruan dan vokasi menjadi tanpa makna jika masyarakat dan peserta didik kurang memiliki apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan dan kurang memiliki perhatian terhadap cara bekerja yang benar dan produktif sebagai kebiasaan atau habits.

Kemudian apa bedanya pendidikan vokasi atau kejuruan dengan pendidikan teknologi? Pendidikan vokasi dan kejuruan menekankan penguasaan pengetahuan praktis dan spesifik, cakap dalam skill/ketrampilan, kemampuannya pada bidang

reproduksi yang terwujud dari ketrampilan fisik yang tinggi. Sedangkan pendidikan teknologi menekankan pengembangan pengetahuan yang lebih umum dan lebih generik, lebih konseptual, kemampuan kreatif berinovasi dan meneliti, dengan skill intelektual yang tinggi pula.

# Bab 2

## FILOSOFI PENDIDIKAN VOKASI DAN KEJURUAN

Apa perlunya filsafat dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi Indonesia menjadi pertanyaan mendasar dan menarik untuk dibahas diurai secara rinci. Mengutip pernyataan **Dewey** bahwa tugas *philosopher* adalah memberikan garis-garis arahan bagi perbuatan. Karenanya filsafat sangat penting dalam setiap proses pengembangan pendidikan agar sadar arah, benar, dan sesuai kebutuhan. Filsafat pendidikan vokasi menunjukkan garis arahan kemana pendidikan vokasi akan digerakkan atau dirancangprogramkan.

Pendidikan vokasi sebagai *education-for-work* didasarkan atas *philosophy* esensialisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Strom mengutip pernyataan Miller (1994) bahwa pragmatisme merupakan *philosophy* yang paling efektif untuk *education-for-work*. Karena *philosophy* pragmatisme menyeimbangkan *philosophy* esensialisme dan eksistensialisme. Disamping itu *philosophy* lainnya yang mendasari pendidikan vokasi adalah *philosophy* humanisme dalam kaitannya dengan *personal growth* dan *philosophy progressive* dalam kaitannya dengan reformasi sosial.

*Philosophy* esensialisme merupakan akar dari idealisme dan realisme. Esensialisme bertujuan mendidik manusia bernilai guna, bermakna bagi kehidupan, dan kompeten. Esensialisme menekankan peran dan fungsi pendidik atau pelatih dalam proses pembelajaran, ahli, dan menguasai subyek materi, mengembangkan skill dengan berlatih, pengulangan, pengkondisian, dan pengembangan kebiasaan baik dalam mempengaruhi perilaku peserta didik. Pembelajaran peserta didik dilakukan

secara progresif dari skill yang kurang komplek ke skill yang lebih komplek. Esensialis biasanya mengajarkan subyek materi membaca, menulis, mengkaji literatur, bahasa asing, sejarah, matematika, sains, seni dan musik.

**Plato** sebagai tokoh esensialis menyatakan bahwa dunia jasmani senantiasa berubah sedangkan dunia akali abadi tidak berubah. Tujuan *philosophy* baginya adalah untuk memperoleh pengetahuan sejati. Manusia sering membuat pernyataan “ini kepala saya, ini otak saya, ini mata saya, ini hidung saya, ini telinga saya, ini mulut saya, ini tangan saya, ini kaki saya, ini badan saya, dan seterusnya”. Lalu “saya ini siapa?”. Saya bukan kepala, bukan otak, bukan mata, bukan hidung, bukan telinga, bukan mulut, bukan tangan, bukan kaki. Saya adalah sang Roh esensi dari manusia.

*Philosophy* eksistensialisme menyatakan setiap individu manusia membentuk makna kehidupannya sendiri-sendiri. Memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri. Realitas kehidupan bersifat subjektif. Manusia selalu akan menemukan dirinya dalam dunia, kontek utamanya adalah kesadaran diri siapakah aku. **Soren Kierkegaard** menulis alam manusia dan identitas manusia berbeda bergantung pada tata nilai dan keyakinan yang mereka pegang/anut. Tugas paling berat bagi setiap orang menurutnya adalah menjadikan dirinya eksis sebagai individu yang unik bermakna (*personal growth*). **Jean Paul Sartre** meyakini individu menciptakan hakikat dirinya sendiri melalui pilihan dan tindakan secara bebas. Profesi dengan segala tindakan dan akibatnya adalah pilihan. Karenanya dalam *philosophy* jawa perlu *tatas, tutus, titis, titi lan wibawa* (mendasar, totalitas, satu visi, ketelitian dalam memandang hidup).

Struktur ciptaan manusia semacam lembaga-lembaga dapat secara serius membatasi dan melemahkan kebebasan manusia. **Simone de Beauvoir** memberi sintesis akibat buruk cara pendidikan kaum perempuan mengakibatkan tersingkirnya kaum perempuan secara sistematis dalam perannya sebagai yang lain dari kaum laki-laki. Kemudian **Friedrich Neitzsche** dengan prinsip fundamentalnya menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kehendak untuk berkuasa (*will to power*). Menurutny, ada dua jenis nilai dalam kehidupan manusia yaitu nilai yang

diciptakan oleh golongan lemah (“moralitas budak”) dengan menjunjung tinggi keutamaan-keutamaan semacam belas kasih, cinta *altruism*, kelembahlembutan, serta nilai golongan kuat (“moralitas tuan”) dengan keutamaan semacam kekuatan dan keberanian.

Pragmatisme atau eksperimentalisme merupakan gerakan *philosophy* Amerika yang menginginkan hasil yang kongkrit. Sesuatu yang penting harus pula kelihatan dalam kegunaannya. Oleh karena itu, pertanyaan “*what is*” harus dieliminir dengan “*what for*”. Pragmatisme merupakan *philosophy* bertindak, mempertanyakan bagaimana konsekuensi praktisnya dalam hidup manusia. Kaitannya dengan dunia pendidikan kejuruan, kaum pragmatisme menghendaki pembagian persoalan teoritis dan praktis. Pengembangan teori memberi bekal etik dan normatif, sedangkan praktik mempersiapkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proporsionalisasi teori dan praktis itu penting agar pendidikan tidak melahirkan materialisme terselubung ketika terlalu menekankan pada hal praktis. Juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan praktis masyarakat, sebab kalau demikian yang terjadi berarti pendidikan dapat dikatakan disfungsi.

**John Dewey** sebagai tokoh pragmatis dan progressive menyatakan hidup ini tidak statis, melainkan bersifat dinamis. *All is in the making*, semuanya dalam perkembangan. Pandangan Dewey mencerminkan teori evolusi dan kepercayaannya pada kapasitas manusia dalam kemajuan moral dan lingkungan masyarakat, khususnya melalui pendidikan. Pengalaman (*experience*) adalah salah satu kunci dalam *philosophy* instrumentalisme. *Philosophy* instrumentalisme Dewey dibangun berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan berpangkal dari pengalaman-pengalaman. Untuk menyusun kembali pengalaman-pengalaman tersebut diperlukan pendidikan yang merupakan transformasi yang terawasi dari keadaan tidak menentu ke arah keadaan tertentu.

Dalam pandangan yang berbeda John Dewey meyakini bahwa tujuan dasar pendidikan adalah untuk mempertemukan kebutuhan individu untuk pemenuhan pribadinya dan persiapan menjalani hidup. Siswa pendidikan kejuruan diajari bagaimana memecahkan masalah secara berbeda-beda sesuai kondisi

individu masing-masing. Dewey menolak gambaran siswa sebagai individu yang pasif, dikendalikan oleh tekanan ekonomi pasar dan eksistensinya dibatasi dalam mengembangkan kapasitas intelektualnya. Dewey memandang siswa adalah aktif memburu dan mengkonstruksi pengetahuan (Rojewski, J.W., 2009:21).

Pemikiran Dewey secara filosofi dikenal sebagai pragmatisme yang dalam tahun-tahun terakhir diidentifikasi sebagai filosofi pendidikan vokasi yang paling utama (Rauner, F., 2009; Huisinga, R., 2009). Pendidikan pragmatis mencoba menyiapkan siswa dapat memecahkan masalah-masalah nyata secara logis dan rasional, terbuka mencari dan menemukan alternatif-alternatif solusi serta siap melakukan eksperimen. *Outcome* yang diharapkan dari pendidikan pragmatis adalah masyarakat berpengetahuan yang secara vokasional mampu beradaptasi, mampu mencukupi dirinya sendiri, berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi, dan berpandangan bahwa belajar dan beraksi adalah proses yang panjang (Lerwick, 1979 dalam Rojewski.J.W., 2009).

Belakangan Amerika Serikat tidak lagi menggunakan istilah *vocational education* dan diganti dengan *Career and Technical Education* (CTE) sebagai pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang untuk mendapatkan karir jabatan dan berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang terkait dengan kerja (MacKenzie, J. and Polvere, R.A., 2009). Filosofi lain dari pendidikan kejuruan/vokasi adalah "*Matching*": *what job was needed and what was needed to do the job* (Thompson, 1973:150). Filosofi ini sejalan dengan filosofi pragmatisme. Miller (1985) menganjurkan bahwa filosofi pragmatisme adalah filosofi terefektif untuk pendidikan dunia kerja (*education-for-work*). Dalam filosofi pragmatisme tujuan dari TVET adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu seseorang dalam menyiapkan kehidupannya, menekankan pemecahan masalah, berpikir dalam orde tinggi, pembelajarannya dikonstruksi pengetahuan sebelumnya (Miller, 1985, 1996; Rojewski, J.W., 2009; Brown,A., Bimrose,J., Barnes,S.A., 2009). Pendidikan kejuruan dan vokasi bagi kaum pragmatis adalah penyalarsan akan kebutuhan pekerjaan dan ketrampilan atau kompetensi apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut. Pendidikan kejuruan dan vokasi menjadi selalu dinamis dan bahkan harus adaptif dengan perubahan kebutuhan

pekerjaan itu sendiri. Filosofi ini kemudian memunculkan teori *deman driven* sebagai pengganti *supply driven*.

Pragmatisme mencari tindakan yang tepat untuk dijalankan dalam situasi yang tepat pula. Miller menyatakan pendidik pendidikan kejuruan akan berhasil jika mampu mempraktikkan dan mempertahankan prinsip-prinsip pragmatisme sebagai referensi dan dasar praktik pendidikan di tempat kerja (*workplace education*). Pragmatisme menyatakan bahwa diantara pendidik dan peserta didik bersama-sama melakukan *learning process* (Heinz, W.R., 2009; Deitmer, L., Heinemann, L., 2009), menekankan kepada kenyataan atau situasi dunia nyata, konteks dan pengalaman menjadi bagian sangat penting, pendidiknyanya progresif kaya akan ide-ide baru.

Kaum pragmatis adalah manusia-manusia empiris yang sanggup bertindak, tidak terjerumus dalam pertengkaran ideologis yang mandul tanpa isi, melainkan secara nyata berusaha memecahkan masalah yang dihadapi dengan tindakan yang konkrit. Menurut Tilaar (2002:184) pragmatisme melihat nilai pengetahuan ditentukan oleh kegunaannya didalam praktik. Karenanya, teori bagi kaum pragmatis hanya merupakan alat untuk bertindak, bukan untuk membuat manusia terbelenggu dan mandeg dalam teori itu sendiri. Teori yang tepat adalah teori yang berguna, siap pakai, dan dalam kenyataannya berlaku serta memungkinkan manusia bertindak secara praktis. Kebenaran suatu teori, ide atau keyakinan bukan didasarkan pada pembuktian abstrak, melainkan didasarkan pada pengalaman, pada konsekuensi praktisnya, dan pada kegunaan serta kepuasan yang dibawanya. Pendeknya, ia mampu mengarahkan manusia kepada fakta atau realitas yang dinyatakan dalam teori tersebut.

Bagi kaum pragmatis, yang penting bukan keindahan suatu konsepsi melainkan hubungan nyata pada pendekatan masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai prinsip pemecahan masalah, pragmatisme mengatakan bahwa suatu gagasan atau strategi terbukti benar apabila berhasil memecahkan masalah yang ada, mengubah situasi yang penuh keraguan dan keresahan sedemikian rupa, sehingga keraguan dan keresahan tersebut hilang. Dalam kedua sifat tersebut terkandung segi negatif pragmatisme dan segi-segi positifnya. Pragmatisme cenderung

mengabaikan peranan diskusi, membatasi kreativitas, dan dapat membuat manusia menjadi alat kehidupan semata. Justru di sini muncul masalah, karena pragmatisme membuang diskusi tentang dasar pertanggungjawaban yang diambil sebagai pemecahan atas masalah tertentu. Sedangkan segi positifnya tampak pada penolakan kaum pragmatis terhadap perselisihan teoritis, pertarungan ideologis serta pembahasan nilai-nilai yang berkepanjangan, demi sesegera mungkin mengambil tindakan langsung.

Dalam kaitan dengan dunia pendidikan kejuruan dan vokasi, kaum pragmatisme menghendaki pembagian yang tetap terhadap persoalan yang bersifat teoritis dan praktis. Seperti yang sudah dipraktikkan di dunia pendidikan kejuruan 60% praktik dan 40% teori atau nanti bisa sebaliknya karena industri sekarang sudah berbasis pengetahuan. Pengembangan terhadap yang teoritis akan memberikan bekal yang bersifat etik dan normatif, sedangkan yang praktis dapat mempersiapkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proporsionalisasi antara teoritis dan praktis itu penting agar pendidikan kejuruan dan vokasi tidak melahirkan materialisme terselubung ketika terlalu menekankan yang praktis. Pendidikan kejuruan juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan praktis masyarakat, agar tidak dikatakan disfungsi dan tidak memiliki konsekuensi praktis.

Pragmatisme sebagaimana definisi Miller, menyeimbangkan kedua filosofi esensialisme dan eksistensialisme dan memberi ruang ide baru yang praktis. Pragmatisme tanggap terhadap perkembangan inovasi-inovasi program seperti *tech-prep* yang menyediakan pendidikan kejuruan/vokasi bertemu dengan kebutuhan tuntutan tempat kerja. Praktisi pendidikan untuk dunia kerja (*education-for-work*) dapat menerapkan filosofi pragmatisme atau dipadukan dengan filosofi esensialisme dan eksistensialisme untuk merefleksikan kegiatan dalam membentuk atau mengadopsi visi lembaganya (Strom, 2006).

Pendidikan kejuruan dikembangkan dengan memperhatikan studi sektor ekonomi, studi kebijakan pembangunan ekonomi, dan studi pemberdayaan tenaga kerja (*man-power*). Perkembangan ekonomi sering memiliki pengaruh utama pada isi dan arah kurikulum dan program pendidikan kejuruan dan vokasi. Globalisasi bisnis dan pasar menghasilkan peningkatan

substansial dan persaingan tenaga kerja terampil dan barang bermutu tinggi (Rojewski, J.W., 2009; Pavlova, M., 2009). Kebutuhan tenaga kerja terbesar untuk orang dengan metode inovatif dan kreatif untuk: (a) memproduksi produk baru dan jasa; (b) mempromosikan dan pemasaran barang-barang baru dan jasa kepada konsumen (Friedman, 1999; Reich, 2000).

Stucky dan Bernardinelli (1990) meyakini bahwa filsafat rekonstruksi-radikal harus digunakan oleh para praktisi *education-for-work*. Mereka yakin bahwa filsafat radikal untuk pelatihan dan pengembangan akan memberi ruang perubahan-perubahan yang akan menjadi “mata pisau” dan melihat kedepan sebagai perspektif yang menyebabkan pendidik dan pekerja bertindak sebagai agen perubahan di tempat kerja dan di masyarakat.

Menurut Tilaar (2002:91) pendidikan adalah sarana penting dalam pembentukan kapital sosial. Pengembangan pendidikan memerlukan pengetahuan organisasi sosial, adat istiadat setempat dimana peserta didik hidup dan berkembang. Dalam gempuran budaya global pendidikan kejuruan harus memiliki arah yang jelas, identitas dan pegangan yang kuat. Konsep pendidikan kejuruan dalam konteks Indonesia dapat ditelusur dari pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara dengan ungkapan “*ngelmu tanpa laku kothong, laku tanpa ngelmu cupet*” yang bermakna ilmu tanpa ketrampilan menerapkan adalah kosong, sebaliknya ketrampilan tanpa ilmu/teori pendukung menjadi kerdil (Hadiwaratama, 2005).

Humanisme adalah *philosophy* yang menegaskan harkat dan martabat manusia ditentukan oleh kemampuannya untuk menentukan benar salah secara universal. Humanisme mendorong moralitas universal berdasarkan komunalitas kondisi manusia, menganjurkan solusi sosial kemasyarakatan dan masalah-masalah budaya secara konprehensif. Manusia sebagai makhluk hidup lebih penting nilainya dari makhluk hidup lainnya. Kecerdasan spiritual sangat besar pengaruhnya kepada kesuksesan hidup penuh makna bagi seseorang. **Swami Prabhupada** menyatakan ada empat hal yang selalu membuat manusia sibuk. Kesibukan tersebut berhubungan dengan masalah: (1) *eating*, (2) *sleping*, (3) *mating*, dan (4) *depending*. Disisi lain binatang juga melakukan keempat hal ini. Lalu

Prabhupada mempersoalkan apa bedanya manusia dengan binatang?. Prabhupada menyatakan tanpa prinsip-prinsip kecerdasan spiritual manusia adalah binatang berkaki dua berjalan paling tegak, paling buas melebihi harimau dan singa. Binatang butuh tidur tapi tidak memerlukan kasur dan ruang ber-AC. Binatang juga melakukan tradisi perkawinan berketurunan tetapi tidak memerlukan pesta dansa, jas serba mewah. Binatang memerlukan pertahanan diri tetapi tidak menggunakan senjata nuklir. Kemajuan aspek material sementara baru menciptakan keterikatan, ketidakpuasan, ketertekanan, depresi, belum membuat bahagia. Karenanya manusia memerlukan pengembangan kecerdasan spiritualnya.

Membentuk kehidupan yang lebih baik untuk semua manusia fokusnya adalah melakukan sesuatu yang baik pada tempat dan waktu yang tepat. Dalam bidang pendidikan humanisme berpegang pada studi dan pengembangan intelek manusia harus lebih memanusiaikan manusia. Pendidikan humanis mempercayai pelajaran terbaik untuk anak terbaik adalah pelajaran terbaik untuk semua anak ("*the best studies, for the best kids*" are "*the best studies*" for all kids").

Kecocokan "*matching*" manusia dengan pekerjaan merupakan dasar *philosophy* pendidikan vokasi. Pengembangan pendidikan vokasi diawali dengan permasalahan mendasar yaitu: "pekerjaan apa yang diperlukan?" dan "apa yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan itu?". Pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan permintaan pasar (*demand driven*) atau penciptaan pasar (*market driven*). Relevansi program-program pendidikan vokasi dengan pasar kerja serta hubungan yang erat antara *employee* dengan *employer* merupakan praksis utama penyelenggaraan pendidikan vokasi. Ada lima hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pendidikan vokasi yaitu: (1) orientasi ketrampilan yang dapat dipasarkan; (2) orientasi lingkungan kerja; (3) orientasi social; (4) orientasi *exit point* (ketrampilan khusus); dan (5) orientasi perkiraan karier khusus.

Secara pragmatis pendidikan vokasi lahir dari kebutuhan nyata sistim ekonomi, melayani sistim ekonomi karena diturunkan dari kebutuhan pasar kerja. Pendidikan vokasi terkait langsung dengan sistim pendidikan dan bursa tenaga kerja. Ada hubungan yang sangat erat diantara masyarakat disatu sisi

dengan sekolah dan pasar kerja disisi lain. Pendidikan vokasi lebih memerlukan kebijakan antar departemen secara sinergis. Thompson menyarankan perlunya kebijakan sumberdaya manusia dalam pengembangan dan pemanfaatan tenaga kerja sebagai sumberdaya ekonomi individu maupun keluarga. Tujuan ditetapkannya kebijakan sumber daya manusia adalah agar peluang-peluang kerja bagi semua yang membutuhkan menjadi seimbang, bebas memilih jenis-jenis okupasi atau pekerjaan dan menjamin pendapatan masyarakat. Pendidikan vokasi menjamin proyeksi perkembangan potensi setiap individu sesuaiya "*men and jobs*" dengan kerugian income dan produksi yang minimal.

Prinsip dasar pendidikan vokasi adalah manusia dilatih untuk keperluan okupasi, jabatan, pekerjaan yang diperlukan masyarakat. Pendidikan vokasi menekankan "*learning by doing*" dan "*hands-on experience*". Kerjasama pihak penyelenggara pendidikan vokasi dengan DU-DI mutlak diperlukan baik berkaitan dengan pengembangan standar-standar kompetensi, pelatihan kompetensi produktif, sertifikasi dan juga rencana penyerapan lulusan. Efektivitas pendidikan vokasi diukur dari jumlah lulusan yang terserap dan bekerja di DU-DI atau berwirausaha.

Pada dimensi sosial pendidikan vokasi secara formal menyiapkan generasi muda memenuhi kebutuhan dunia kerja. Perbaikan dan pengaturan keseimbangan diantara kebutuhan individu, masyarakat, kebutuhan sosial, dan pengaturan kurikulum dalam pendidikan vokasi akan menjadi masalah bagi pendidik. Sistem dan kurikulum pendidikan vokasi harus memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu dan gender untuk berkarier. Bukan sebuah sistem pencipta kuli atau tukang atau mesin-mesin pemuas ekonomi yang bertentangan dengan prinsip esensialisme dan eksistensialisme.

Pendidikan vokasi bukan pendidikan kelas dua secara struktural untuk kalangan menengah ke bawah, tetapi pendidikan vokasi adalah pendidikan dengan jalur tersendiri. Pendidikan vokasi akan efisien jika menjamin ketersediaan tenaga kerja secara memadai (Thompson). Karenanya, prinsip dasar pendidikan vokasi harus melatih masyarakat menguasai kompetensi pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai *demand*. Pendidikan vokasi harus mengembangkan eksistensi manusia bukan merampasnya.

Membangun seluruh potensi manusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal. Pendidikan vokasi juga harus mengkaitkan dirinya dengan sistim-sistim yang lain yaitu ekonomi, ketenagakerjaan, politik, sosial, religi, dan moral.

Pendidikan vokasi dijalankan atas dasar prinsip investasi (*human capital*) artinya semakin tinggi pendidikan/pelatihan seseorang, semestinya orang yang bersangkutan semakin produktif, mendapatkan upah yang lebih besar, (*human capital theory*). Secara sosiologi pendidikan kejuruan dan vokasi memperhatikan hubungan antar manusia, antar kelompok, antar sistim. Tuntutan melakukan berbagai pekerjaan secara tim menjadi kebutuhan yang mendasar dan semakin berkembang. Kemampuan kerja dan penguasaan lintas budaya juga menjadi sangat penting karena kondisi dan iklim kerja lintas negara dan lintas benua juga semakin terbuka luas. Segala upaya yang dilakukan dalam pendidikan kejuruan dan vokasi selalu berpegang teguh pada keharmonisan hubungan antar sesama individu, antar sistim pendidikan dengan sistim lain (ekonomi, sosial, politik, religi, moral). Karenannya prinsip kerjasama, kolaborasi merupakan aspek penting penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kejuruan. Seperti apapun baiknya program pendidikan kejuruan dan vokasi bila sistem ekonomi dan sistem politik terganggu maka efektivitasnya pasti akan terganggu. Pendidikan kejuruan dan vokasi adalah pendidikan yang sangat rentan terhadap berbagai keadaan politik ekonomi suatu bangsa atau negara bahkan kondisi dunia. Oleh karena itu pendidikan kejuruan dan vokasi membutuhkan regulasi yang baik dari pemerintah.

# Bab 3

## TEORI PENDIDIKAN VOKASI DAN KEJURUAN

Pendidikan kejuruan dan vokasi dikembangkan tidak semata-mata menggunakan instrument kebijakan pendidikan tetapi juga menggunakan instrument kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan ketenaga kerjaan (Atchoarena, D., 2009). Pendidikan kejuruan dan vokasi peka terhadap masalah-masalah dan perubahan sosial masyarakat. Diminati atau sebaliknya tidak diminatinya pendidikan kejuruan dan vokasi itu sangat tergantung dengan keadaan sosial masyarakat itu sendiri. Hanya karena peminat dari pendidikan kejuruan dari sebagian besar kalangan menengah kebawah, pendidikan kejuruan menjadi pendidikan kelas dua. Tentunya itu adalah pandangan sosial yang kurang tepat dan tidak rasional. Secara rasional pendidikan kejuruan dan vokasi pada suatu bangsa atau negara seharusnya mencapai 60% yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berkemampuan sedang dan menengah.

Secara ekonomi dan politik pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi membutuhkan kebijakan terbentuknya kerjasama, dukungan dan partisipasi penuh dari organisasi-organisasi pemerintah dan non pemerintah (baca dunia usaha dan dunia industri), terbentuk konsensus diantara *stakeholder* (Heinz, W.R., 2009; Hiniker, L.A, Putnam, R.A., 2009), proaktif dan tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dan mengadopsi strategi jangka panjang, tanggap terhadap perubahan lingkungan ekonomi global, perubahan sistem ekonomi dan politik, dan membumikan budaya masyarakat setempat (Gleeson, 1998:47; Rau, 1998:78; Bailey, Hughes, & More, 2004:100; Clarke & Winch, 2007:130; Raelin, 2008:46). Pendapat

Jobert, Mary, Tanguy dan Rainbird (1997) dikutip oleh Clarke dan Winch (2007:4) menyatakan perlunya interkoneksi antara pendidikan dan pekerjaan (Billet, S., 2009). Pendidikan kejuruan membutuhkan partisipasi penuh dunia usaha dan dunia industri termasuk masyarakat pengguna pendidikan kejuruan.

Dalam perspektif sosial ekonomi pendidikan kejuruan dan vokasi adalah pendidikan ekonomi sebab diturunkan dari kebutuhan pasar kerja, memberi urunan terhadap kekuatan ekonomi (Singh, M., 2009; Ahadzie. W., 2009; Hawley, J.D., 2009; Pavlova, M., 2009). Pendidikan kejuruan dan vokasi adalah pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja (Hansen, R., 2009; Billet, S., 2009; Hiniker, L.A., and Putnam, R.A., 2009). Pendidikan kejuruan dan vokasi harus selalu dekat dengan dunia kerja (Wardiman, 1998:35; Hiniker, L.A., and Putnam, R.A., 2009). Menurut Wardiman (1998:32), pendidikan kejuruan dikembangkan melihat adanya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Peserta didik membutuhkan program yang dapat memberikan ketrampilan, pengetahuan, sikap kerja, pengalaman, wawasan, dan jaringan yang dapat membantu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihan kariernya (Tessaring, M., 2009; Billet, S., 2009; Hiniker, L. and Putnam, R.A., 2009).

Pendidikan kejuruan melayani tujuan sistem ekonomi, peka terhadap dinamika kontemporer masyarakat (Singh, M., 2009; Pavlova, M., 2009). Pendidikan kejuruan juga harus adaptif terhadap perubahan-perubahan dan difusi teknologi, mempunyai kemanfaatan sosial yang luas (Pavlova, M., 2009; Boutin, F., Chinien, C., Moratis, L., and Baalen, P.V., 2009). Sebagai pendidikan yang diturunkan dari kebutuhan ekonomi pendidikan kejuruan jelas lebih mengarah pada *education for earning a living* (Singh, M., 2009; Pavlova, M., 2009). Pendidikan kejuruan berfungsi sebagai penyesuai diri "akulturasi" dan pembawa perubahan "enkulturasi". Pendidikan kejuruan mendorong adanya perubahan demi perbaikan dalam upaya proaktif melakukan penyesuaian diri dengan perubahan dan mampu mengadopsi strategi jangka panjang. Hampir semua negara di dunia melakukan reformasi pendidikan kejuruan agar pendidikan kejuruan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan (Hiniker, L. and Putnam, R.A., 2009).

Seperti pemerintahan negara-negara lain di dunia, pemerintah Indonesia mengharapkan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan dapat mewujudkan prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh sistem pendidikan umum. Pemerintah akan meningkatkan pelatihan jika suplai tenaga kerja menunjukkan peningkatan yang cepat, pekerjaan tumbuh dengan pesat, atau jika pengangguran meningkat secara signifikan. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyiapkan pekerja memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan (Chinien, C. and Singh, M., 2009; Rychen, D.S., 2009; Singh, M., 2009; Pavlova, M., Maclean, R., 2009). Sistem pendidikan kejuruan membantu para pemuda penganggur dan pencari kerja mengurangi beban pendidikan tinggi, menarik investasi luar negeri, meyakinkan penghasilan dan pekerjaan yang meningkat, menekan kesenjangan di antara kaum kaya dan kaum miskin (Gill, Dar, Fluitmn, Ran, 2000: 1). Namun banyak catatan bahwa harapan-harapan ini masih sebagai impian dibandingkan sebagai kenyataan.

Temuan penelitian Bank Dunia (Middleton, Ziderman, and Adams, 1993; World Bank 1991) menegaskan bahwa tujuan ganda kebijakan pendidikan dan pelatihan kejuruan adalah: (1) untuk mendorong perbekalan pribadi dan pembiayaan; (2) meningkatkan efisiensi publik dalam penyediaan pendidikan dan latihan kejuruan. Menurut Finlay (1998) pendidikan kejuruan/vokasi mengembangkan tenaga kerja "*marketable*" dengan kemanfaatan melebihi sebagai "alat produksi". Pendidikan kejuruan/vokasi tidak sekedar mencetak tenaga kerja sebagai robot, tukang, atau budak. Pendidikan kejuruan/vokasi juga harus memanusiasikan manusia untuk tumbuh secara alami dan demokratis (Grubb, W.N. and Lazerson, M., 2009) Menurut Tilaar (2002:35), suatu masyarakat yang mempunyai tradisi toleransi yang tinggi dan terbuka untuk mencapai kompromi merupakan lahan subur perkembangan demokrasi. Pengaruh perubahan global harus ditaati secara berstruktur agar dapat memberikan keuntungan bagi rakyat banyak tidak terjebak dalam eforia kehilangan identitas.

Pendidikan kejuruan didasarkan kebutuhan dunia kerja "*demand-driven*". Penekanannya terletak pada penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja di masyarakat

lingkungannya (Tessaring, 2009; Heinz, 2009; Billet, 2009; Wagner, 2008). Kesuksesan peserta didik pada “*hands-on*” atau performa dunia kerja (Chinien, C. and Singh, M., 2009). Hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan/vokasi (Heinz, W.R., 2009; Agrawal, P., 2009; Singh, M., 2009). Pendidikan kejuruan harus responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi (Wardiman, 1998: 37). Kemakmuran dan kekuatan suatu negara terletak pada penguasaan dan pemanfaatan IPTEKS (Tilaar, 2002:47).

Menurut Rojewski (2009:20-21), di Amerika Serikat pada awal tahun 1900-an telah terjadi perdebatan tentang pelatihan vokasi dan kejuruan dalam pendidikan umum. Ada dua tokoh sejarah yang bersilang pendapat satu sama lain yaitu Charles Prosser dan John Dewey. Prosser memandang pendidikan vokasi dan kejuruan dari sudut efisiensi sosial yang menempatkan posisi sekolah kejuruan sebagai wahana pemenuhan kebutuhan ketenaga kerjaan suatu Negara bukan untuk pemenuhan kebutuhan individu. Kubu efisiensi sosial menyiapkan pelatihan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan kejuruan diorganisir dengan urutan yang rigid dengan pemasrahan *hand-on instruction* oleh orang yang berpengalaman luas (Rowjeski J.W., 2009).

Pengembangan dan penataan pendidikan kejuruan dan vokasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Pendidikan kejuruan dan vokasi adalah pendidikan ekonomi sebab diturunkan dari kebutuhan pasar kerja, memberi urunan terhadap kekuatan ekonomi nasional, melayani tujuan sistim ekonomi. Prinsip ini merupakan prinsip pendidikan sebagai investasi ekonomi pendukung dan penyangga pembangunan suatu bangsa yang harus berjalan secara efisien. Pendidikan kejuruan dan vokasi merupakan pendidikan yang mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat, menstabilkan perekonomian, membangun pemerataan pendapatan dan kesejahteraan hidup berdampingan satu sama lain.

2. Pendidikan kejuruan dan vokasi harus memperhatikan permintaan pasar (*demand driven/market driven*). Tingkat relevansi pendidikan kejuruan dan vokasi dapat diukur dari tingkat kesesuaian program-program pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Semakin tinggi kesesuaian program pendidikan kejuruan dan vokasi terhadap permintaan pasar berarti relevansi pendidikan kejuruan dan vokasi itu semakin tinggi pula. Untuk itu program pendidikan dan pelatihan pada pendidikan kejuruan dan vokasi sangat perlu memperhatikan permintaan pasar dan bahkan harus sampai kepada kemampuan menciptakan pasar. Pendidikan kejuruan dan vokasi sudah harus meninggalkan jauh-jauh prinsip *supply driven*. Karena prinsip *supply driven* sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan tuntutan perkembangan dunia kerja kita yang semakin mudah berubah dan cepat usang.
3. Pendidikan kejuruan dan vokasi akan efisien jika lingkungan dimana seseorang dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti akan bekerja. Berlatih yang sempurna adalah berlatih ditempat kerja sesungguhnya, berinteraksi dengan situasi nyata dan kontekstual. Berlatih ditempat kerja dan dinilai oleh masyarakat secara langsung jauh lebih baik daripada dinilai oleh guru atau instruktur di sekolah. Karena tidak mudah melakukan pelatihan kerja di dunia kerja, sekolah dapat membuat replika kerja dalam bentuk bengkel kerja, restoran, hotel sekolah, teaching factory dan sejenisnya yang mendekati situasi tempat kerja. Namun bagaimanapun baiknya tempat kerja dan berlatih yang dibuat di lingkungan sekolah tetap saja tidak bisa meniru lingkungan kerja karena lingkungan sekolah cenderung memampatkan dan terbatas waktu. Sekolah tidak bisa terbuka 24 jam seperti layanan pada dunia industri. Sekolah tidak bisa terbuka bebas membuat program pelatihan kepada siswa pada malam hari misalnya pada saat belajar mengamati bagaimana mengawinkan ikan.
4. Pendidikan kejuruan dan vokasi akan efektif jika penguasaan kompetensi dalam bentuk tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang ada di

tempat kerja. Prinsip ini adalah prinsip pokok pembelajaran dalam pendidikan kejuruan yang disebut dengan *Learning by Doing* dan *Hands On Experience*. Kesiapan kerja lulusan pendidikan kejuruan dan vokasi sangat erat kaitannya dengan cara-cara kerja, serta kesesuaian alat dan mesin yang digunakan selama menjalani pelatihan. Berlatih ketrampilan harus melalui belajar sambil melakukan dan pengalaman langsung. Pendidikan kejuruan dan vokasi akan efektif dan lulusan menunjukkan kesiapan kerja tinggi jika banyak diberi pelatihan praktik dan pengalaman kerja yang tinggi. Hanya perlu diingat pelatihan dan pemberian pengalaman kerja membutuhkan biaya tinggi.

5. Pendidikan vokasi akan efektif jika diklat kompetensi membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulang sehingga sesuai dengan keperluan kerja nantinya. Tidaklah mudah bagi siapapun dalam membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang tinggi tanpa pengulangan-pengulangan. Berlatih ketrampilan baik psikomotorik maupun kognitif sangat perlu pengulangan-pengulangan yang intensip hingga sampai dengan kondisi ketrampilan bersifat reflek. Kebiasaan bekerja dan berfikir keras dalam memecahkan setiap permasalahan seharusnya menjadi budaya pada setiap pendidikan kejuruan dan vokasi.
6. Pendidikan vokasi akan efektif jika memberikan kemampuan kepada setiap individu memodali minatnya dan kompetensinya pada tingkat yang paling tinggi. Pendidikan kejuruan dan vokasi sebaiknya memperhatikan perkembangan karier peserta didik. Pendidikan vokasi dan kejuruan sebagai pendidikan karier penting sekali memperhatikan struktur modal ketrampilan yang harus dikuasai sesuai level pendidikannya. Untuk mewujudkan pencapaian modal kompetensi yang baik pendidikan vokasi dan kejuruan memerlukan modal bahan dan peralatan yang tidak murah. Minat dalam pendidikan vokasi dan kejuruan sangat penting diperhatikan terutama dalam proses pemilihan jenis kompetensi keahlian.
7. Pendidikan vokasi dan kejuruan efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya untuk seseorang yang

memerlukan dan menginginkan mendapatkan untung darinya. Pendidikan vokasi dan kejuruan membutuhkan kemauan dan motivasi tinggi dalam berlatih dan belajar disamping kemampuan dasar. Pada setiap orang yang membutuhkan pendidikan vokasi atau kejuruan harus ada pandangan yang cukup mendalam dan benar terhadap keuntungan apa yang akan didapat setelah menjalani pendidikan vokasi atau kejuruan. Profesi, jabatan, pekerjaan apa yang dapat dimasuki setelah lulus dari suatu pendidikan vokasi atau kejuruan. Adakah profesi, jabatan, atau pekerjaan itu di lapangan? Jika tidak ada maka pendidikan vokasi atau kejuruan itu dapat dikatakan in-efisien dan sudah pasti tidak efektif.

8. Pendidikan vokasi akan efektif jika pelatihnya memiliki pengalaman yang sukses dalam penerapan kompetensi pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan. Ketrampilan sebagai hasil dari suatu proses pendidikan vokasi dan kejuruan sesungguhnya dikembangkan dari sukses pengalaman dalam penerapan kompetensi operasi atau proses suatu pekerjaan. Hanya para ahli atau para profesional lah yang dapat menunjukkan bagaimana suatu ketrampilan dilakukan, dipelajari, atau dilatihkan. Untuk itu para pelatih dan pendidik pada pendidikan vokasi dan kejuruan harus memiliki pengalaman yang baik pada bidang-bidang ketrampilan yang akan diajarkan. Pelatihan-pelatihan dan praktik pengalaman lapangan yang disertai sertifikasi kompetensi kejuruan menjadi penting bagi guru dan pendidikan pendidikan vokasi dan kejuruan.
9. Pendidikan vokasi harus memiliki hubungan erat dengan DU-DI karena merupakan kunci sukses pendidikan vokasi dan kejuruan. Kemampuan kerja lulusan pendidikan vokasi dan kejuruan tidak mungkin dapat dibentuk seluruhnya di sekolah dan kampus. Sebaik apapun peralatan yang dimiliki oleh sekolah dalam mengembangkan praktik ketrampilan siswa masih saja belum lengkap, karena disiplin kerja sulit dibentuk di sekolah atau kampus yang masih mengedepankan proses pendidikan yang memberi kelonggaran atas disiplin kecepatan kerja dan lain sebagainya. Disamping itu

pendidikan vokasi dan kejuruan sebagai pendidikan untuk dunia kerja, program pendidikan dan kurikulumnya harus dikembangkan dari kompetensi kerja yang ada pada dunia usaha dan dunia industri. Agar bisa mengembangkan program dan kurikulum diklat, sudah seharusnya lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan menggandeng DU-DI yang relevan sebanyak-banyak. DU-DI juga dapat berperan sebagai pengguna lulusan, asesor, supervisor program pendidikan vokasi dan kejuruan. Dengan selalu dekat dengan DU-DI pendidikan vokasi dan kejuruan bisa selalu up-to-date program-program pelatihannya. Hubungan yang erat dengan DU-DI memang menjadi kunci sukses pendidikan kejuruan karena pendidikan kejuruan perlu melakukan model pendidikan ganda sebagaimana di sekolah atau kampus dan sebagai di DU-DI.

10. Pendidikan vokasi harus responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi khususnya teknologi elektronika digital dan mikroprosesor telah merubah tatanan pekerjaan dimuka bumi ini. Keberadaan teknologi mikroprosesor yang bekerja sebagai perangkat mesin utama dalam komputer telah menjelma menjadi berbagai peralatan teknologi ICT, teknologi kendali, teknologi pemroses yang diimplementasikan dalam bidang komunikasi, pengolah data elektronik, otomotif, otomasi industri, kedirgantaraan, energi, rekayasa, kedokteran dan lain sebagainya. Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan harus merespon perkembangan teknologi mikroprosesor dalam berbagai segi penyelenggaraan program pendidikan kejuruan. Paling tidak teknologi ICT harus sudah direspon dan diantisipasi pada semua program diklat pendidikan kejuruan dan vokasi. Pemanfaatan ICT untuk pembelajaran dengan berbagai sumber belajar perlu memanfaatkan ICT.
11. Pendidikan vokasi membutuhkan pasilitas mutakhir untuk praktik. Pengembangan kompetensi kejuruan tanpa pasilitas dan peralatan praktik adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Untuk menyiapkan lulusan yang trampil dan trengginas pendidikan vokasi dan kejuruan membuthkan peralatan yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan dan

peralatan yang digunakan di DU-DI. Permasalahannya pendidikan vokasi dan kejuruan menjadi sangat mahal. Lalu siapa yang bisa membiayai? Apakah mungkin dicukupi oleh pemerintah atau swasta bersama masyarakat pengguna pendidikan kejuruan dan vokasi. Setelah semua pasilitas dan peralatan praktik terpenuhi, bagaimana dengan efisiensi dan juga perawatan dan bahkan perbaikannya. Karena banyak peralatan praktik saat ini lifetime nya pendek padahal pemanfaatannya untuk berlatih di sekolah terbatas hanya pagi hari pukul 7.00 sampai dengan siang hari pukul 13. Pada malam hari semua peralatan praktik sudah pasti off semua.

12. Pembiasaan pada seseorang tercapai efektif jika pelatihan diberikan pada pekerjaan nyata sarat nilai. Kompetensi kejuruan yang diselenggarakan pelatihannya di sekolah vokasi dan kejuruan sesungguhnya diturunkan dari pekerjaan atau task yang nyata dan ada di DU-DI. Pelatihan-pelatihan kompetensi kejuruan yang dikembangkan dari berbagai jenis pekerjaan atau task yang ada di DU-DI memang suatu keharusan bagi pendidikan kejuruan dan vokasi. Hanya pelatihan-pelatihan kompetensi kejuruan yang sesuai dengan pekerjaan nyata di DU-DI yang bernilai. Pelatihan-pelatihan kompetensi kejuruan yang tidak memperhatikan pekerjaan yang ada di DU-DI adalah pemborosan dan sia-sia. Untuk itu lembaga pendidikan kejuruan harus selalu memperhatikan efektivitas berbagai jenis pelatihan yang diselenggarakan di sekolah kejuruan dan vokasi.
13. Isi diklat merupakan okupasi pengalaman para ahli atau profesional. Hanya para ahli dan para profesional lah yang dapat menguraikan isi atau konten pendidikan vokasi dan kejuruan yang baik, benar, dan berkecukupan. Hanya para ahli yang profesional yang dapat menguraikan secara tepat kemampuan atau kompetensi apa yang harus dikuasai dari suatu okupasi atau pekerjaan. Pengalaman para ahli atau profesional harus dijadikan sebagai bahan acuan pengembangan program pendidikan vokasi dan kejuruan. Seperti model pengembangan kompetensi yang digunakan dalam

DACUM, para ahli yang profesional digunakan sebagai panelis.

14. Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi (*body of content*) yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Isi kompetensi okupasi atau pekerjaan dalam bidang teknologi dan rekayasa berbeda dengan isi okupasi pekerjaan dalam bidang bisnis manajemen dan juga berbeda dengan isi okupasi bidang pekerjaan seni dan pariwisata, kesehatan, agorindustri, dan agribisnis. Masing-masing bidang pekerjaan harus dijabarkan isi kompetensinya dengan melakukan analisis pekerjaan.
15. Pendidikan vokasi dan kejuruan akan merupakan layanan sosial efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memerlukan, efektif jika dilakukan lewat pengajaran kompetensi, dan penilaian berbasis kinerja. Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan sebagai layanan sosial harus memperhatikan kebutuhan masyarakat suatu wilayah dilayannya. Lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan harus selalu melakukan studi kelayakan tentang kebutuhan masyarakat pengguna pendidikan vokasi dan kejuruan serta kelayakan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kompetensi pekerjaan yang dipersyaratkan oleh DU-DI. Secara sosial pendidikan vokasi dan kejuruan tidak bermakna jika program pendidikan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat penggunaannya dan kebutuhan DU-DI yang akan menggunakan lulusannya. Hanya kompetensi-kompetensi yang diperlukan di DU-DI lah yang patut dilatihkan di lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan. Keberhasilan program-program pendidikan vokasi dan kejuruan sangat perlu dinilai dari seberapa kinerja lulusannya dapat menjalankan pekerjaan nyata di DU-DI. Penilaian kinerja adalah bentuk penilaian otentik dari pendidikan vokasi dan kejuruan. Yang patut menilai adalah pengguna lulusannya bukan atau tidak terbatas hanya penilaian guru atau dosen di sekolah.
16. Pendidikan vokasi dan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pendidikan umum, jika tidak terpenuhi tidak boleh dipaksakan beroperasi. Ini sudah pasti adalah konsekuensi logis dari pendidikan yang banyak

mebutuhkan pelatihan. Kebutuhan bahan praktik dan mesin atau peralatan memerlukan dukungan biaya tinggi.

Masalah-masalah pendidikan vokasi dan kejuruan umumnya terletak pada peningkatan kualitas akses dan peningkatan kualitas mutu. Secara umum pendidikan vokasi dan kejuruan harus membangun regulasi kerangka kerja yang dapat mendorong investasi fisik, fiskal, dan modal manusia serta institusi makroekonomi dalam mengambil kebijakan keberlangsungan output dan pertumbuhan lapangan kerja. Reformasi kebijakan pendidikan vokasi dan kejuruan dilakukan dengan mengevaluasi persediaan program-program pendidikan vokasi dan kejuruan dengan perubahan permintaan pasar kerja, membangun komitmen kerjasama, dan melakukan perbaikan dukungan implementasi. Hambatan besar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan kejuruan dan vokasi adalah ketidakcukupan anggaran biaya untuk pengembangan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kejuruan. Disamping itu ketidaklengkapan informasi ketersediaan training dan fragmentasi pelaksanaan kompetensi keahlian, lemahnya jaringan informasi diantara penyedia training dengan para pengguna, dan lemahnya kapasitas kemampuan lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan merupakan masalah-masalah utama pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi. Masalah-masalah yang mungkin terjadi diantara pengembang pendidikan kejuruan dan vokasi antara lain: (1) pertumbuhan tenaga kerja tinggi sedangkan pertumbuhan lapangan kerja rendah sehingga laju pengangguran meningkat; (2) pertumbuhan tenaga kerja tinggi dan pertumbuhan lapangan kerja tinggi sehingga laju pengangguran menjadi rendah; (3) pertumbuhan tenaga kerja rendah dan pertumbuhan lapangan kerja rendah sehingga laju pengangguran sedang. Tekanan akibat pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi menyebabkan masalah-masalah kebijakan pada saat pertumbuhan lapangan kerja yang tidak memenuhi .

# Bab 4

## ASUMSI-ASUMSI PENDIDIKAN VOKASI DAN KEJURUAN

Asumsi adalah anggapan yang diterima sebagai kebenaran. Asumsi diuji dari keseringannya terjadi di masyarakat (*reliability*) dan keajegannya terjadi di masyarakat (*konsistensi*), dan kebenarannya diterima oleh umum (*valid*). Asumsi-asumsi pendidikan kejuruan dan vokasi adalah sebagai berikut (Thompson, 1973:89-116). Pendidikan kejuruan dan vokasi digerakkan oleh kebutuhan pasar kerja dan berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional. Keberadaan pendidikan vokasi dan kejuruan sedari awal memang dikembangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pasar kerja suatu daerah kabupaten, negara, bahkan pasar kerja luar negeri. Pasar kerja atau lapangan pekerjaan yang ada dan berkembang dan dibutuhkan oleh masyarakat suatu negara dalam proses pembangunan bangsanya harus dijadikan sebagai basis pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi. Bahkan pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan dapat saja digunakan dan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui program-program kewirausahaan. Pergeseran paradigma pendidikan kejuruan dan vokasi dalam rangka menuju pemenuhan pasar tenaga kerja harus berubah total dari *supply driven* ke *demand driven*. Dengan paradigma *demand driven* pendidikan kejuruan dirancang program diklatnya berdasarkan kebutuhan pasar dan lapangan kerja. Krisis ekonomi yang menyebabkan krisis pekerjaan membutuhkan perubahan paradigma dari *demand driven* ke *market driven*. Dalam paradigma *market driven* pendidikan kejuruan dan vokasi diharapkan mampu mencipt-

takan wirausaha baru yang dapat menggerakkan pasar dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pendidikan kejuruan dan vokasi diselenggarakan untuk mempersiapkan tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah modal pembangunan ekonomi bangsa. Dengan demikian, pendidikan kejuruan dan vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terlatih akan memberi kontribusi besar pada penguatan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan kekuatan ekonomi nasional bangsa.

Pendidikan kejuruan dan vokasi dapat membantu pengentasan pengangguran melalui training anak-anak muda dan orang dewasa dan mentraining kembali untuk layanan ketrampilan dan kompetensi teknis (Billet, S., 2009; Heisig, U., 2009; Schaack, K., 2009). Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dalam pendidikan vokasi dan kejuruan yang diperuntukkan untuk membentuk kompetensi kerja masyarakat membantu menekan pengangguran dan bahkan diharapkan bisa meniadakan atau mengentaskan pengangguran. Pengangguran yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang disebabkan oleh ketiadaan ketrampilan teknis dapat diatasi melalui pelatihan-pelatihan kejuruan yang ada di lembaga pendidikan kejuruan dan vokasi. Banyak bidang ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk program pengentasan kemiskinan. Pelatihan perawatan dan perbaikan perangkat telepon genggam, perangkat komputer, perangkat mesin cuci, perangkat alat pendingin, perangkat listrik, perangkat audio-video rumah tangga, perangkat audio-video kendaraan roda empat dan sebagainya dapat dilatihkan bagi masyarakat kota yang menganggur. Dalam bidang teknik sipil, pekerjaan-pekerjaan bangunan membutuhkan tenaga kerja mulai dari tenaga pelayan tukang, tukang bangunan kayu, tukang bangunan beton, tukang bangunan finishing, tukang bangunan instalasi air bersih dan kotor juga sangat mungkin memberi solusi penanganan dan pengentasan pengangguran. Pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pertanian dan perkebunan, tambang, seni kerajinan, pariwisata, pemasaran, kesehatan masyarakat, peternakan, perikanan, jasa boga dan jasa busana juga sangat besar bisa menyerap tenaga kerja. Pendidikan kejuruan dan vokasi dapat mengembangkan *marketable man* dengan pengembangan kemampuannya untuk membentuk ketrampilan yang dapat melebihi sebagai alat produksi. Tenaga kerja trampil

dan memiliki sikap kerja profesional, menguasai budaya kerja dan budaya komunikasi yang tinggi sangat mudah mencari dan mendapatkan pekerjaan. Pemasaran dirinya menjadi sangat baik dan diminati oleh pengguna atau pemakai tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan prestasi pendidikan dan ketrampilan bagi anggota masyarakat, untuk pemenuhan pribadi mereka, termasuk untuk bekerja, untuk partisipasi yang lebih besar dalam masyarakat sipil dan untuk manfaat yang lebih luas seluruh komunitas (Burke, G., Smith, C.S., 2009). Asumsi ini merupakan dasar dari justifikasi keberadaan pendidikan kejuruan dan vokasi, yang dihubungkan dengan teori ekonomi dan teori sosial.

Menurut Thompson (1973), pendidikan kejuruan dan vokasi adalah pendidikan untuk produksi, melayani akhir dari sistem ekonomi dan dikatakan memiliki kelengkapan sosial. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh Atchoarena, D., pada tahun 2009. Pendidikan kejuruan dan vokasi pada tingkat menengah difokuskan pada penyiapan individu awal memasuki dunia kerja.

Pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia dalam menja-lankan visi dan misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berorientasi pada kebutuhan komunitas baik lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kejuruan sebagai pendidikan dunia kerja penting sekali mencermati kebutuhan dan harapan masyarakat pengguna jasa pendidikan di daerah kabupaten/kota, propinsi, lintas propinsi dan bahkan dunia. Bila suatu pendidikan vokasi dan kejuruan memiliki nilai strategis tinggi bagi masyarakat internasional, misalnya dalam bidang pariwisata bisa saja akan kebanjiran siswa atau mahasiswa asing yang menjadi pelanggan pendidikan. Pendidikan vokasi dan kejuruan strategis bisa menjadi industri pendidikan kejuruan bagi suatu negara. Kunci pokok keberhasilan pendidikan vokasi dan kejuruan terletak pada kemampuannya memahami dan menterjemahkan kebutuhan masyarakat pengguna pendidikan kejuruan dan vokasi dan kemampuan membaca jenis-jenis jabatan dan jumlah lapangan kerja yang ada di masyarakat. Pergeseran dan perubahan pandangan masyarakat terhadap suatu jenis pekerjaan akan merubah sikap masyarakat dalam memilih jenis-jenis kompetensi yang diselenggarakan dalam pendidikan kejuruan. Sebagai

sebuah contoh SMK di suatu kabupaten di Bali sulit sekali mendapat siswa dalam kompetensi keahlian kerajinan karena masyarakat disekitarnya sudah bergeser pandangannya dari bekerja menjadi perajin ukir, lukis, patung ke pekerjaan kapal pesiar yang lebih bergengsi dan lebih banyak memberi penghasilan rupiah. Walaupun bisnis kerajinan di Bali sangat tinggi transaksinya, tetap saja masyarakat Bali kurang berminat menyekolahkan anaknya di kompetensi keahlian kerajinan karena pengrajin dianggap kurang beken. Demikian juga pandangan masyarakat terhadap tenaga dan tukang bangunan yang tidak menguntungkan bagi SMK kompetensi keahlian bangunan gedung. Masyarakat kurang berminat menyekolahkan anaknya pada kompetensi keahlian bangunan sederhana karena pekerjaan bangunan dianggap pekerjaan kasar, padahal lapangan kerja dalam bidang bangunan tersedia sangat besar dan luas. Untuk mengatasi permasalahan semacam ini perlu dilakukan upaya-upaya strategis dan logis untuk mendudukkan pandangan masyarakat pada suatu pekerjaan. Misalnya memberi pakaian seragam kerja pada tukang bangunan sehingga anak-anak menjadi tertarik dan mau memilih kompetensi keahlian bangunan sederhana sebagai tempat untuk berlatih. Yang penting juga harus diperhatikan adalah nilai imbalan atau gaji yang didapat arus sesuai dengan beban kerja yang diterima.

Pendidikan kejuruan dan vokasi mensyaratkan setiap orang harus belajar bekerja sebab setiap orang harus memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja dan berpenghasilan adalah rahmat dan berkah bagi keluarga sedangkan menganggur adalah beban dan celaka bagi keluarga. Pendidikan kejuruan dan vokasi harus mampu mendorong masyarakat meningkatkan berkah kehidupannya sebagai rahmat dari Tuhan Yang Mahaesa. Bekerja secara tekun dan terus menerus sebagai kewajiban bagi setiap orang.

Pendidikan kejuruan dan vokasi harus dievaluasi berdasarkan efisiensi ekonomis. Pendidikan kejuruan dan vokasi secara ekonomis efisien jika menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan spesifik dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan kejuruan dan vokasi disebut baik jika menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan nyata yang eksis di masyarakat dan mereka menginginkan. Pendidikan kejuruan dan vokasi

efisien jika menjamin penyediaan tenaga kerja untuk satu bidang pekerjaan. Pendidikan kejuruan dan vokasi efektif harus terkait dengan pasar kerja. Pendidikan kejuruan dan vokasi harus direncanakan berdasarkan prediksi pasar kerja (Pavlova, M., 2009). Pendidikan kejuruan dan vokasi efisien jika peserta didik mendapatkan pekerjaan pada bidang yang mereka ikuti.

Asumsi pendidikan kejuruan dan vokasi dari Thompson validitasnya sangat baik karena bisa diterima di berbagai negara. Indonesia yang baru mendorong pendidikan kejuruan di SMK berbasis keunggulan lokal sebagai realisasi dari otonomi pendidikan sangat perlu memperhatikan asumsi-asumsi ini. Pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan pendidikan menengah kejuruan di era otonomi sudah seharusnya memperhatikan pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan komunitas lokal di wilayahnya tanpa melupakan orientasi kebutuhan regional, nasional, dan internasional.

Pengembangan kebijakan pendidikan menengah kejuruan yang tepat akan berdampak ganda bagi pemerintah daerah baik dalam konspirasi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Memang benar pendapat Wardiman Djojonegoro bahwa pendidikan kejuruan sangat tepat memerankan fungsi sebagai akulturasi/-penyesuaian diri dan enkulturasi/pembawa perubahan. Pendidikan kejuruan dapat mendorong proses penyesuaian-penyesuaian terhadap pengaruh budaya global dengan tetap berpegang kepada akar budaya lokal (*local culture*). Wali kota Denpasar Ida Bagus Rai Mantra mengajak masyarakat Bali di Surabaya untuk meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi persaingan global dengan tidak meninggalkan identitas selaku orang Bali (Bali Pos, 30 Nopember 2010). Bali sebagai bagian dari Indonesia memiliki budaya lokal yang sangat kuat sebagai modal pelaksanaan proses akulturasi dan enkulturasi pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yang mengakar pada kearifan lokal sangat mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan siswa, kebutuhan penyelenggara pendidikan, program pemerintah daerah, dan masyarakat. Budaya lokal Bali yang unggul perlu dibuatkan rumah budayanya melalui penataan pendidikan kejuruan berbasis budaya lokal.

Walaupun banyak diperdebatkan oleh kelompok John Dewey, teori efisiensi sosial dari Prosser dan Allen tentang pendidikan kejuruan dan vokasi masih banyak digunakan atau masih

banyak menjiwai pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan. Teori Prosser dan Allen menyatakan bahwa pendidikan kejuruan dan vokasi akan:

1. Efisien, jika lingkungan tempat peserta didik dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti bekerja.
2. Efektif, jika tugas-tugas diklat dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu.
3. Efektif, jika melatih kebiasaan berpikir dan bekerja seperti di DU-DI.
4. Efektif, jika setiap individu memodali minatnya, pengetahuan dan ketrampilannya pada tingkat yang paling tinggi.
5. Efektif untuk setiap profesi, jabatan, pekerjaan untuk setiap orang yang menginginkan dan memerlukan keuntungan.
6. Efektif, jika diklat membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang sehingga sesuai atau cocok dengan pekerjaan.
7. Efektif, jika gurunya mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan kompetensi pada operasi dan proses kerja yang telah dilakukan.
8. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia dapat bekerja pada jabatan tersebut.
9. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar atau tanda-tanda pasar.
10. Pembiasaan efektif pada peserta didik tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan nyata sarat nilai.
11. Isi diklat merupakan okupasi pengalaman para ahli.
12. Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi (*body of content*) yang berbeda-beda satu dengan lainnya.
13. Sebagai layanan sosial efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memerlukan.
14. Pendidikan kejuruan efisien, jika metoda pengajarannya mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik.
15. Pembiasaan efektif pada peserta didik tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan nyata sarat nilai.

Teori Prosser dan Allen sangat kuat pengaruhnya pada pendidikan dan pelatihan kejuruan di berbagai negara khususnya di negara-negara berkembang. Taiwan menggunakan sistem simulasi, dimana bengkel praktik kerja dibangun di sekolah kejuruan seperti atau sama dengan fasilitas industri. Yang kedua dengan *on-the-job training* dimana tempat kerja juga untuk pengajaran. Demikian juga dengan Jerman yang menggunakan *dual system*, TAFE di Australia menerapkan *work-place-learning* untuk mendekatkan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Di Amerika Serikat *work-based-learning* berkembang dengan baik dengan skil terstandar.

Teori Prosser dan Allen sebagian tidak relevan lagi dengan konteks perkembangan abad 21. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membentuk industri berbasis pengetahuan mendorong laju keusangan sebuah teknologi semakin cepat. Pendidikan dan pelatihan kejuruan yang dikembangkan berdasarkan teori Prosser dan Allen pertama, kedua, dan ketiga akan berdampak berlawanan yaitu tidak efektif dan efisien lagi karena mesin-mesin dan peralatan cenderung mahal dan cepat usang. Disamping itu efisiensi pemanfaatan mesin-mesin bagi pendidikan kejuruan dan vokasi masih sangat minim kurang dari 7 jam per hari. Belum lagi masa jeda liburan sekolah yang menyebabkan pemanfaatan mesin tidak ada sama sekali. Dalam hal ini masalah pokok yang terjadi adalah siapa yang akan membiayai pengembangan peralatan pendidikan di SMK. Teori yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan efektif jika gurunya mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan kompetensi pada operasi dan proses kerja yang telah dilakukan juga perlu diperdebatkan. Kesuksesan dengan cara-cara masa lalu belum tentu sesuai dan memberi jaminan sukses saat ini. Dengan demikian, pengembangan inovasi dan kualitas pendidikan menengah kejuruan sangat perlu memperhatikan konteks yang berubah terus menerus.

Efisiensi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di SMK diberbagai daerah cenderung rendah. Pelatihan dengan penuh waktu, sarana, dan biaya bahan yang tinggi untuk membentuk kompetensi belum dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja. Akibatnya, kompetensi lulusan menjadi kurang bermakna karena lulusan tidak mendapatkan pekerjaan atau

meneruskan kejengjang pendidikan tinggi. Pelatihan dengan biaya tinggi menjadi tidak efektif.

Model penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan perlu dikaji dan dikembangkan kembali. Sekurang-kurangnya ada empat model pendidikan kejuruan yang bisa diterapkan di negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Pertama, pendidikan kejuruan "model sekolah" yaitu model penyelenggaraan pendidikan kejuruan dimana pendidikan dan latihan sepenuhnya dilaksanakan di SMK. Model ini berasumsi segala yang terjadi ditempat kerja dapat dididik latih di SMK. Akibatnya, SMK harus melengkapi semua jenis peralatan yang diperlukan dalam jumlah yang besar. SMK menjadi sangat mahal karena faktor keusangan peralatan tinggi dan sulit mengikuti perubahan di dunia usaha dan industri yang jauh lebih mutakhir dan berkualitas. Di samping itu bahan praktek akan menyedot biaya yang sangat besar. Model sekolah yang mahal cenderung tidak efisien dan tidak efektif karena peralatan di dunia kerja berubah sedangkan SMK tidak langsung bisa mengikuti perubahan di lapangan.

Kedua, pendidikan kejuruan "model sistem ganda" (PSG) yaitu model penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang memadukan pemberian pengalaman belajar di SMK dan pengalaman kerja sarat nilai di dunia usaha. Model ini sangat baik karena menganggap pembelajaran di SMK dan pengalaman kerja di dunia usaha akan saling melengkapi, lebih bermakna, dan nyata. Kebiasaan kerja di dunia kerja sesungguhnya sulit dibangun di SMK karena sekolah cenderung hanya membentuk kebiasaan belajar saja. Disiplin kerja sangat berbeda dengan disiplin belajar dan berlatih. Kelemahan sistem ganda sangat rentan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. DU-DI di Indonesia masih sulit memberi kepastian-kepastian terhadap layanan pendidikan karena sistem di Indonesia belum mengakomodasikan kepentingan industri bersamaan dengan kepentingan layanan pendidikan.

Ketiga, pendidikan kejuruan dengan "model magang" adalah model yang menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelatihan kepada industri dan masyarakat tanpa dukungan SMK. SMK hanya menyelenggarakan pendidikan mata pelajaran normatif, adaptif, dan dasar-dasar kejuruan. Model ini hanya cocok untuk negara

maju yang telah memiliki sistem pendidikan dan sistem industri yang kuat.

Keempat, pendidikan kejuruan dengan "model *school-based-enterprise*". Model ini mengembangkan dunia usaha di SMK dengan maksud selain menambah penghasilan SMK, juga sepenuhnya memberikan pengalaman kerja yang benar-benar nyata dan sarat nilai kepada peserta didiknya. Sebagai contoh SMKN 1 Sewon Bantul mengembangkan *education hotel* yang disingkat dengan Edotel di Kasongan Bangunjiwo Kasihan Bantul yang dikelola oleh SMK dengan melibatkan peserta didik mulai dari urusan *house keeping* hingga *front office*. Selama lebaran banyak tamu yang menginap (*Kedaulatan Rakyat*, 8 Oktober 2008). Model ini sangat baik digunakan untuk mengurangi ketergantungan SMK terhadap industri dalam melakukan pelatihan kerja.

Di lapangan banyak SMK masih mengalami masalah penerapan model dalam pelaksanaan praktek kerja industri (prakerin). Kerancuan penyelenggaraan terjadi di antara model magang dan model sistem ganda. Ada SMK yang menerjemahkan prakerin dengan istilah magang dan ada yang mengartikan PSG. Keduanya rancu karena SMK dan industri tidak ada hubungan sama sekali dalam penetapan perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan. Sehingga selama prakerin peserta didik lepas begitu saja mengikuti aliran kegiatan industri seadanya. Tidak ada kurikulum yang pasti yang dilaksanakan selama prakerin. Ke depan SMK harus mendorong kepastian kompetensi-kompetensi yang harus dilatihkan di DU-DI. Kebutuhan pengembangan kompetensi siswa harus betul-betul dianalisis mengenai teori apa yang harus diajarkan di sekolah, ketrampilan dasar apa yang harus dilatihkan di sekolah dan ketrampilan teknis apa yang harus dipelajari di DU-DI sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembentukan ketrampilan siswa menjadi utuh dan benar sesuai silabus dan kurikulum yang ada. Dengan demikian, program-program pendidikan di SMK dapat terus menerus dievaluasi dan disupervisi kekurangannya untuk dicarikan solusi atau jalan keluar.

# Bab 5

## **PRAKTIK PENDIDIKAN VOKASI DAN KEJURUAN INDONESIA**

Sampai saat ini paling tidak ada enam bidang pekerjaan yang disiapkan pendidikan dan pelatihannya melalui pendidikan menengah kejuruan. Keenam bidang keahlian itu adalah: (1) bidang keahlian teknologi dan rekayasa; (2) bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi; (3) bidang keahlian kesehatan; (4) bidang keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata; (5) bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi; dan (6) bidang keahlian bisnis dan manajemen.

Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan bidang keahlian teknologi dan rekayasa cukup banyak. Untuk kelompok teknik bangunan, teknik plumbing, sanitasi, survei, dan pemetaan jabatan pekerjaan yang ada antara lain: operator pengadaan/-logistik proyek, drafter bangunan, pembantu kepala gudang/-kepala bengkel, pembantu perencana bangunan, pelaksana bangunan, juru gambar konstruksi kayu, pelaksana produksi pembuatan komponen kayu, pelaksana pekerjaan konstruksi kayu, pelaksana pekerjaan konstruksi kayu, pelaksana finishing kayu. Ada juga pekerjaan drafter bangunan, estimator, pelaksana konstruksi bangunan, pelaksana logistik furnitur, teknisi furnitur, juru gambar mebeler, juru ukur. Untuk pekerjaan sanitasi ada jabatan pekerjaan pelaksana pengelolaan air bersih, pelaksana pemasangan alat saniter, pelaksana penyambungan, drafter instalasi air bersih, instalasi air kotor, pelaksana pengolahan limbah, termasuk juga pekerjaan juru ukur tanah.

Dalam bidang teknik ketenaga listrik, teknik pendingin, dan tata udara pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan untuk diambil antara lain: pelaksana pemasangan jaringan listrik, pelaksana instalasi listrik penerangan, pelaksana pemasangan peralatan pengaman, pembatas, dan pengendali. Disamping itu ada pekerjaan operator teknis instalasi listrik penerangan, operator teknis instalasi, operator teknis pembuatan dan perakitan panel, operator teknis instalasi tenaga listrik, operator teknis perakitan komponen listrik, operator mesin produksi, pelaksana pemasangan jaringan transmisi, pemeliharaan jaringan transmisi, pemeriksa peralatan jaringan transmisi, operator dan pemelihara instalasi motor-motor listrik, operator dan pemelihara pneumatik dan hidrolik, operator dan pemelihara rangkaian mikrokontroler dan sistem mikroprosesor, operator dan pemelihara sistem mekatronika, operator dan pemelihara SCADA, operator PLC, operator dan pemelihara sensor. Untuk sistem pendingin dan tata udara ada pekerjaan pelaksana pemasangan dan pemeliharaan sistem refrigerasi untuk transportasi darat dan laut, pemasangan dan pemeliharaan sistem refrigerasi domestik, pemeliharaan dan perbaikan komponen sistem refrigerasi dan tata udara, pemeliharaan dan perbaikan komponen sistem refrigerasi dan tata udara, perakitan dan pengujian sistem refrigerasi dan tata udara komersial, perakitan trainer-trainer mesin pendinginan dan tata udara, operator mesin pendingin, merawat dan memperbaiki mesin refrigerasi, operator mesin pengeringan udara, merawat dan memperbaiki mesin pengering udara.

Pekerjaan-pekerjaan dalam bidang teknik mesin dan otomotif antara lain: pelaksana konstruksi baja, pelaksana fabrikasi, pelaksana konversi gambar kerja, pembuat gambar kerja secara manual, pembuat gambar kerja dengan CAD, operator mesin perkakas konvensional, melaksanakan pengukuran, operator/-pelaksana pekerjaan setting komponen mekanik, operator/-pelaksana pekerjaan memonitor dan mencatat kondisi komponen peralatan dan mesin industri, operator/pelaksana pekerjaan pemeliharaan komponen peralatan dan mesin industri, operator/pelaksana pekerjaan perbaikan komponen peralatan dan mesin industri, operator mesin perkakas konvensional, operator mesin perkakas CNC, pembuat pola, inti dan cetakan logam,

operator *melting & pouring* (peleburan & penuangan), juru gambar pengecoran, juru las (*welder*). Dalam bidang otomotif ada pekerjaan operator teknisi/mekanik kendaraan ringan, pelayanan suku cadang, operator teknisi perakitan, pelaksana teknisi produksi, operator mesin perikanan, oprtaor teknisi/mekanik sepeda motor, operator pemeliharaan sepeda motor, pelaksana perbaikan bodi, pengecatan, perbaikan dan pemasangan aksesoris, mekanik alat berat, pelaksana pemeliharaan dan perbaikan elektronika mobil.

Jenis-jenis pekerjaan untuk bidang pesawat udara antara lain: pelaksana perawatan rangka pesawat udara (*air frame*), pelaksana perawatan mesin pesawat udara, pelaksana konstruksi badan pesawat udara, pelaksana konstruksi rangka pesawat udara, pelaksana perawatan kelistrikan dan instrumen pesawat udara, pelaksana perawatan sistem elektronika pesawat udara, pelaksana perawatan komponen listrik avionik. Dalam bidang perkalapalan jenis pekerjaan yang ada antara lain: menggambar konstruksi kapal baja, melaksanakan pekerjaan dasar teknik kapal baja, melaksanakan pembuatan perlengkapan kapal baja, melaksanakan perbaikan kapal baja, melaksanakan perakitan kapal baja, menggambar konstruksi kapal kayu, pelaksana pembuatan kapal kayu, pembantu teknisi fitting kapal kayu, pelaksana perbaikan dan perawatan kapal kayu, mengoperasikan mesin kapal kayu, mencampur bahan *fiber glass*, membaca gambar konstruksi, melapisi konstruksi dengan *fiber glass*, merawat dan memperbaiki badan kapal *fiber glass*, membantu pekerjaan instalasi permesinan kapal, pelaksana pemotongan pelat tebal kapal, mengelas pelat tebal berbagai posisi, mengelas pelat tipis, kerajinan, dan brazing, pelaksana instalasi listrik kapal, pelaksana gambar rancang bangun kapal, pelaksana pekerjaan teknik interior kapal, menggambar dan fabrikasi interior kapal, perakitan dan *finishing*.

Pekerjaan-pekerjaan untuk bidang teknologi tekstil antara lain sebagai operator mesin pemintalan serat buatan, operator sistem pengolahan limbah, operator mesin-mesin pembuatan kain (kelos, gintir, palet, hani, kanji), wirausaha tenun tradisional, operator mesin-mesin pembuat benang, pelaksana perawatan dan perbaikan mesin pembuat benang, pelaksana penyempurna-

an tekstil, wirausaha pencapan/sablon, pelaksana pembuatan pakaian jadi.

Dalam bidang teknik grafika, pekerjaan yang dapat dilakukan antara lain desain grafis barang cetakan, pembuatan film, pembuatan plat, pencetakan, pelaksana desain grafis barang cetakan, pelaksana produksi barang cetakan. Sedangkan untuk bidang geologi pertambangan ada pekerjaan seperti operator alat-alat geologi pertambangan, pelaksana pengeboran eksplorasi dan peledakan, pelaksana survei lapangan, pelaksana preparasi dan analisis sampel laboratorium. Dalam bidang instrumentasi industri jenis pekerjaannya antara lain operator peralatan instrumentasi gelas, pelaksana perawatan dan perbaikan instrumentasi gelas, pelaksana pembuatan instrumentasi gelas, operator peralatan instrumentasi gelas, pelaksana perawatan dan perbaikan instrumentasi gelas, pelaksana pembuatan instrumentasi logam, operator sistim instrumentasi kontrol proses, pelaksana perawatan dan perbaikan sistim instrumentasi kontrol proses, operator sistim instrumentasi kontrol mekanik, pelaksana perawatan dan perbaikan sistim instrumentasi kontrol mekanik.

Dalam bidang teknik kimia lulusan pendidikan kejuruan dapat mengambil pekerjaan sebagai pelaksana analisis kimia, pelaksana pengambilan sampel, pelaksana analisis konvensional, pelaksana analisis instrumental, pelaksana analisis kimia organik & anorganik, pelaksana analisis mikrobiologis, pelaksana pemeliharaan dan perbaikan peralatan analisis kimia, operator industri kimia. Kemudian dalam bidang pelayaran, ada pekerjaan perwira kapal penangkap ikan, operator kapal penangkap ikan, pelaksana perawatan dan perbaikan kapal penangkap ikan, perwira kapal niaga.

Operator produksi industri, operator pergudangan, pelaksana pengiriman barang, pelaksana pemeliharaan barang adalah pekerjaan dalam bidang teknik industri. Dalam bidang teknik perminyakan beberapa pekerjaan yang mungkin bagi lulusan pendidikan kejuruan adalah operator produksi migas, operator pemboran minyak, operator pengolahan minyak, gas dan petrokimia.

Bidang-bidang pekerjaan untuk teknik elektronika antara lain operator, instalator, perawatan, dan perbaikan sistem audio video, operator peralatan sistem kontrol elektronik, pelaksana perawatan dan perbaikan sistem kontrol elektronik, operator alat kendali pneumatik hidrolik, pelaksana pemeliharaan dan perbaikan alat kendali pneumatik hidrolik.

Dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi bidang pekerjaan yang dapat diakses antara lain pembantu teknisi transmisi jaringan kabel, jaringan optik, jaringan radio, pembantu teknisi sentral TDM-PSTN, pembantu teknisi instalasi *private branch exchange* PBX, pembantu teknisi komunikasi telepon berbasis IP, pembantu teknisi sentral telepon sistem komunikasi bergerak seluler, pembantu teknisi jaringan akses tembaga, pelaksana rekayasa perangkat lunak, operator teknik komputer dan jaringan, visualisator desain grafis, operator web, visualisator media interaktif, operator kamera, operator editing video, pelaksana *scriptwriter*, *voice talent artist (dubber)*, karakter desainer, *background artist*, *storyboard artist*, *layout artist*, *animator 2d*, *animator 3d*, *inbetweener*, *coloring artist*, *editor*, pelaksana produksi film dan program televisi, dan pelaksana produksi program radio.

Pekerjaan dalam bidang kesehatan antara lain tenaga pelaksana kesehatan, pelaksana analisis kesehatan, pelaksana peracikan obat, pelayanan informasi obat, penggolongan obat, melakukan pencatatan dan dokumentasi perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, pembuatan obat, pemasaran obat, pelayanan obat, pembantu teknisi pembuatan obat, pelaksana teknis pengemasan obat, pelaksana teknis kontrol kualitas obat, melakukan kalibrasi, kualifikasi peralatan dan validasi, melaksanakan sistem dokumentasi farmasi industri, melaksanakan sistem dokumentasi farmasi industri, pelayanan sosial usia lanjut, pekerja sosial rehabilitasi, pekerja sosial koreksi, pekerja sosial pendidikan anak usia dini, pelayanan sosial kesehatan mental, dan pelayanan sosial NAPZA.

Pekerjaan penata artistik, pelukis, dekorator, drafter, pematung, perancang model patung, pembantu desainer, fotografer, ilustrator, pelaksana pencetakan, pengusaha sablon,

fotografer freelance, pelaksana pekerjaan periklanan, pembuat video dokumentasi, pembantu kameramen, pembantu editor, pembantu penata suara, pembantu penata cahaya, perancang interior hunian, animator interior hunian, drafter interior hunian, perancang interior transportasi, animator interior hunian, drafter interior hunian, perancang dan produksi kria tekstil, perancang dan produksi kria kulit, perancang dan produksi kria keramik, perancang dan produksi kria logam, perancang dan produksi kria kayu, pemusik trumpet, gitaris, operator midi, penari, pengrawit, pelatih seni, pengelola seni pertunjukan, penata kerawitan sunda, dalang, pekerja seni teater, staff ticketing, staff reservasi, staff perjalanan wisata, pramuwisata muda, staf reservation, reception, operator telepon, porter, *business center attendant*, *room boy/maid/attendant*, *houseman/housemaid*, *order taker*, *linen* dan *laundry*, *waiter/waitress* merupakan pekerjaan dalam bidang seni dan pariwisata. Untuk bidang kecantikan jenis pekerjaannya adalah penata kecantikan kulit, penata kecantikan rambut, pelaksana pembuatan busana butik, *handling*, *steward*, *waiter*, *cook helper*, dan pengolah *pastry bakery*.

Pekerjaan pekerjaan dalam bidang agribisnis dan agro industri antara lain sebagai pengamat organisme pengganggu tanaman, pembantu pengawas mutu benih, praktisi agribisnis, teknisi/mandor pembukaan lahan (*land clearing*) perkebunan, pembantu teknisi/mandor pembibitan tanaman perkebunan, teknisi/mandor tanam, pelaksana mandor rawat/pemeliharaan tanaman, pembantu teknisi/mandor panen dan penanganan paska panen, teknisi nurseri, operator alat mesin pertanian, praktisi agribisnis, pengawas mutu benih, teknisi nursery, teknisi laboratorium/laboran kultur jaringan, teknisi storage, penyuluh peternakan, pengusaha peternakan, inseminator, pembantu teknisi kesehatan ternak, teknisi rumah pemotongan hewan, pemerah susu sapi. Ada juga pekerjaan penyuluh pertanian, operator kendaraan farm dan peralatan agribisnis ternak unggas, perawat kesehatan ternak unggas, vaksinator, teknisi mesin tetas, pengusaha bibit unggas, teknisi agribisnis produksi telur tetas, produsen telur tetas, teknisi agribisnis produksi telur konsumsi, produsen telur konsumsi, teknisi agribisnis produksi unggas potong (ayam jantan, petelur, ayam kampung, itik),

produsen unggas potong, teknisi agribisnis produksi ayam broiler, produsen ayam broiler, teknisi perusahaan pakan ternak unggas, suplier bahan baku pakan unggas, pengusaha/wiraswastawan di bidang ternak unggas, teknisi peternakan (pelaksana budidaya), operator mesin prosesing pakan, vaksinator, teknisi kesehatan hewan, wirausahawan di bidang aneka ternak, operator mesin pengolah limbah, suplier bibit aneka ternak, paramedis veteriner, teknisi penyiapan lahan (media) budidaya perairan, penyedia pakan ikan (alami dan buatan), pengelola lingkungan budidaya perairan, pengobatan hama dan penyakit ikan, penyedia bibit/benih ikan, teknisi budidaya ikan (pembesaran dan pemanenan), teknisi penyiapan lahan budidaya rumput laut, penyedia media penanaman rumput laut, teknisi pembibitan rumput laut, pelaksana budidaya rumput laut, pelaksana penanganan hama dan penyakit rumput laut, teknisi penanganan pasca panen rumput laut, teknisi penguji kualitas rumput laut, teknisi pengembangan pasca panen rumput laut, operator/teknisi alat mesin perbengkelan, desain alat mesin pertanian tepat guna, operator/teknisi alat mesin pertanian, teknisi bengkel alat mesin pertanian, asisten laboratorium tanah, asisten/teknisi/juru bengkel, wirausaha pertanian, operator/teknisi motor bensin dan motor diesel manual, operator/teknisi traktor roda dua (*hand tractor*), operator/teknisi traktor roda empat (*farm tractor*), operator/teknisi alat-alat pengolah tanah, operator/teknisi alat mesin penanam, operator/teknisi alat mesin pemeliharaan tanaman, operator/teknisi alat mesin pemanen, operator/teknisi alat pengangkut dan pemindah bahan, operator /teknisi alat mesin pasca panen, operator/teknisi alat mesin pengolahan hasil pertanian, operator dan teknisi alat mesin irigasi dan drainase, asisten/juru ukur tanah/surveyor, operator dan teknisi alat-alat mesin perbengkelan.

Dalam bidang agribisnis perikanan pekerjaan yang ada adalah: teknisi pengadaan bahan baku, pengendali mutu bahan baku (produk perikanan segar), operator teknik pengolah di industri perikanan, operator formulasi produk, teknisi pengendali mutu, teknisi pengemasan produk, operator peralatan pengolahan dan penggudangan, teknisi sanitasi ruang, alat dan bahan, teknisi pengelolaan limbah industri dan hasil samping

perikanan, wira usaha bidang agroindustri. Disamping itu ada juga pekerjaan teknisi penanganan bahan hasil pertanian segar, teknisi gudang penyimpanan bahan dan produk, pengendali kesegaran bahan atau produk (pengemasan, pengangkutan, penyimpanan), operator formulasi produk, operator teknik pengolahan (fisik, non fisik) di berbagai industri hasil pertanian.

Dalam bidang kehutanan pekerjaan-pekerjaannya adalah: pengendali ekosistem hutan, pembantu penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, surveyor pengukuran dan perpetaan hutan, tenaga teknis pada kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), hutan lindung (KPHL) dan hutan konservasi (KPHK), tenaga teknis PHPL penataan hutan, PHPL pembukaan wilayah hutan, tenaga teknis PHPL pemanenan hutan, tenaga teknis PHPL pembinaan hutan, tenaga teknis PHPL kelola sosial/penyuluh masyarakat sekitar hutan, tenaga teknis PHPL pengujian kayu gergajian, tenaga teknis PHPL pengujian kayu bulat, tenaga teknis PHPL pengujian kayu lapis.

Dalam bidang bisnis manajemen khususnya untuk kompetensi keahlian administrasi perkantoran, akuntansi, pemasaran pekerjaan-pekerjaannya adalah: staf administrasi, teknisi akuntansi pelaksana, customer information service, pelaksana lembaga keuangan perbankan, pelaksana lembaga keuangan bukan bank (LKBB), pelaksana pemasaran/penjualan.

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Menurut Hadiwaratama (2005) hakikat pendidikan yang bersifat kejuruan mengikuti proses: (1) pengalihan ilmu (*transfer of knowledge*) atau penimbaan ilmu (*acquisition of knowledge*) melalui pembelajaran teori; (2) pencernaan ilmu (*digestion of knowledge*) melalui tugas-tugas, pekerjaan rumah dan tutorial; (3) pembuktian ilmu (*validation of knowledge*) melalui percobaan-percobaan laboratorium secara empiris atau visual; (4) pengembangan ketrampilan (*skill development*) melalui pekerjaan nyata di bengkel atau lapangan.

Keempat proses ini harus berlangsung dalam proses belajar mengajar baik di sekolah maupun di industri.

Dalam era industrialisasi yang bercirikan ekonomi, negara dan pemerintah membutuhkan SDM yang memiliki multi ketrampilan (Oketch, M.O., Green, A., Preston, J., 2009). Pendidikan kejuruan dan vokasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan SDM. Penyiapan SDM tidak mungkin dilakukan secara sepihak, perlu kerjasama yang erat dengan DU-DI. Pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang konsern pada ekonomi memerlukan kebijakan penyelerasan manusia dengan pekerjaan-pekerjaan. Pendidikan kejuruan melayani sistem ekonomi, dan pasar tenaga kerja. Semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan tenaga kerja baik lokal, nasional, dan global berimplikasi pada pendidikan kejuruan (Billet, S.,2009; Hiniker, L.A., Putnam, R.A., 2009). Dalam kaidah ekonomi tradisional terjadi proses memfasilitasi dan pengaturan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan perubahan permintaan pasar kerja. Tujuan kebijakan ketenaga kerjaan mencakup hal-hal berikut ini.

1. Memberi peluang kerja untuk semuanya yang membutuhkan.
2. Pekerjaan tersedia seimbang dan memberi penghasilan yang mencukupi sesuai dengan kelayakan hidup dalam masyarakat.
3. Pendidikan dan latihan mampu secara penuh mengembangkan semua potensi dan masa depan setiap individu.
4. *Matching men and jobs* dengan kerugian-kerugian minimum, pendapatan tinggi dan produktif.

Di Indonesia pendidikan vokasi diartikan sebagai pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Di tingkat menengah disebut pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu (UU No. 20 Tahun 2003). Pengertian pendidikan vokasi dan pendidikan kejuruan yang tertuang dalam UU Sisdiknas kurang memenuhi kejelasan konsep jika dibandingkan dengan pengertian-pengertian yang diuraikan diatas. Perbedaan istilah vokasi dan kejuruan hanya untuk membedakan jenjang tidak berkaitan dengan makna substansi.

Pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai pendidikan orang dewasa (*adult education*) didesain menyiapkan peserta didik

untuk memasuki dunia kerja (Witting, W., Lauterbach, U., Grollmann, P., 2009; Grubb, W.N., Lazerson, M., 2009). Pendidikan orang dewasa adalah program pendidikan yang dirancang untuk orang dewasa yang menggabungkan pendekatan pendidikan pada kehidupan siswa atau pengalaman kerja, melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan pembelajaran, mendorong belajar dalam kelompok, serta *self-directed learning* (Sauder, M., Naidu, R., 2009). Dalam konteks ini, pendidikan kejuruan/vokasi adalah pendidikan untuk bekerja (*education-for-work*). Istilah *education-for-work* lebih memberi makna pendidikan kejuruan/vokasi sebagai jenis pendidikan yang tujuan utamanya adalah menjadikan individu peserta didik siap pakai di dunia kerja dan memiliki perkembangan karir dalam pekerjaannya.

Jerman merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan pendidikan kejuruan/vokasi. Sistem ganda di Jerman telah membuat negara itu memiliki keunggulan kompetitif dari negara-negara lainnya. Sistem ini telah berhasil menekan angka pengangguran. Di Jerman tidak ada lagi penduduk usia 25 tahun yang tidak bekerja lebih dari 3 bulan. Untuk mendukung itu pemerintah telah menyiapkan pendidikan kejuruan/vokasi (bekerja sama dengan dunia industri dalam program *social responsibility* industri) untuk 17.1% penduduk yang tidak memiliki kemampuan melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Reorganisasi dunia kerja membawa konsekuensi kebutuhan SDM yang memiliki multi ketrampilan, multi bidang, luwes, melek teknologi, mudah dilatih ulang, serta memiliki jiwa kewirausahaan. Karenanya pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi menjadi sangat penting makna dan posisinya dalam menyiapkan SDM. Di Taiwan pemerintah pusatnya menyediakan 15% anggaran untuk mempromosikan pendidikan, sains dan budaya. Pemerintah Cina meningkatkan anggarannya 13,37% pada tahun 1972 menjadi 19,36% pada tahun 1994. Di Taiwan *Departemen of Technological and Vocational Education (DTVE)* dibawah *Ministry of Education (MOE)* menetapkan kebijakan implementasi pendidikan teknologi dan vokasi pada semua jenjang bertujuan mengusahakan tumbuhnya tenaga kerja terampil untuk mendukung perkembangan ekonomi negara (Finlay, Niven, & Young, 1998:71).

Taiwan secara terus-menerus meningkatkan kapasitas sekolah menengah vokasi untuk memenuhi meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil. Pada tahun 1950 ada 77 sekolah menengah vokasi meningkat menjadi 206 pada tahun 1994. Terakhir strategi pendidikan diatur untuk mengantisipasi perkembangan iptek dan struktur industri dan okupasi dari *craft based*/berbasis kerajinan ke berbasis pengetahuan. Caranya: (1) mengurangi penambahan *senior vocational schools*; (2) *encouraging*/mendorong kemapanan sistem *comprehensive senior high schools* dan *six-year high school*; (3) penambahan *institutes of technology* untuk memberikan saluran ke senior vokasional.

Taiwan terbukti sukses melakukan transformasi produk berkaitan dengan komputer. Strategi yang diambil pemerintah Taiwan mencakup hal-hal berikut ini.

1. Memperkuat dan mengadakan program-program retraining untuk pekerja.
2. Menyediakan transfer pekerjaan dan training keahlian kedua (*second-expertise training*).
3. Memperkuat training pada bidang komputerisasi, otomasi industri, CNC, mekatronika, dsb.
4. Melakukan uji ketrampilan dan mengembangkan sistem sertifikasi.
5. Menyediakan training untuk tenaga kerja dalam rangka layanan industri.
6. Mendorong industri untuk melakukan program-program training.
7. Meningkatkan manajemen ketrampilan untuk administrasi dan personil manajer.

Untuk mendorong minat anak muda belajar ketrampilan kejuruan/vokasi dan juga membentuk perhatian masyarakat pada perkembangan skil, dilakukan *National Skill Competition* sejak tahun 1968. Disamping juga berpartisipasi dalam *International Vocational Training Competition (International Youth Skill Olympics)* sejak tahun 1970. *National Skill Competition* yang di Indonesia disebut dengan Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) sangat mendorong tumbuhnya iklim persaingan dan disiplin pelatihan masing-masing SMK di seluruh Indonesia. Dengan LKS sekolah memantapkan program-program pembinaan ketrampilan siswanya sehingga mampu tampil di ajang nasional yang

bergengsi. Melalui LKS forum Industri dapat memantau tingkat kompetensi siswa dan melakukan seleksi tenaga kerja bilamana membutuhkan. Ajang LKS juga membangun komunikasi antar pendidik dan instruktur sehingga terjadi akulturasi antar daerah maju dan daerah yang masih berkembang. Nilai positif yang dapat ditarik adalah adanya pembelajaran secara nasional diantara peserta dan diantara para guru pendamping termasuk terhadap para praktisi dan akademisi yang bekerja sebagai dewan juri.

Pada tahun 1995 Korea memiliki pendapatan perkapita 10 kali perkapita Honduras dan Philipine. Populasi penduduk bertambah rata-rata 0,9% tiap tahun, dari tahun 1985–1995. Pada rentang yang sama pendapatan perkapita tumbuh rata-rata 61,7% per tahun. Dunia industri mengalami pertumbuhan rata-rata 20% setiap tahun. Bidang pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata 20% setiap tahun. Peningkatan yang berarti dari pendapatan penduduk Korea tidak terlepas dari kebijaksanaan pemerintah Korea dalam mengatur dunia industri dan tenaga kerja pelaksanaannya. Peningkatan perekonomian Korea menjadi tujuan besar dengan mendatangkan investor dan memaksimalkan SDM yang dimiliki. Investor diberi kemudahan untuk mendirikan industri, berbagai fasilitas yang mendukung untuk pendirian industri asing seperti lahan, kemudahan perijinan dan keamanan serta tenaga kerja terampil setempat. Tenaga terampil lokal yang telah tersedia sangat menarik bagi investor karena dapat menghemat biaya produksi.

Bagi Korea semakin banyak tenaga terampil yang terserap industri berarti semakin meningkatnya pendapatan negara. Pendapatan negara masih didukung pula oleh ekspor barang hasil industri, hal ini menyebabkan keuntungan ganda bagi Korea. Belajar dari keberhasilan yang telah diperoleh maka Korea selalu mengevaluasi sistem pendidikan kejuruan/vokasi sebagai penyedia tenaga terampil. Tenaga terampil yang dihasilkan oleh sekolah menengah kejuruan selalu berorientasi pada permintaan industri terkini (Buke, G., Smith, C.S.,2009; Atchoarena, D., 2009). Korea menyadari bahwa pada suatu saat tercapai kejenuhan, sehingga perlu untuk membentuk generasi untuk menciptakan dunia industri baru. Hal ini direalisasikan dengan pendidikan kejuruan tingkat tinggi, yang tidak hanya

menghasilkan tenaga kerja terampil tetapi juga pengembang dunia industri.

Pendidikan kejuruan/vokasi sejak tahun 1960 digunakan sebagai instrumen kebijakan tenaga kerja diberbagai Negara (Atchoarena, D., 2009; Billet, S., 2009; Chang, H.G., 2009; Poschen, P., 2009). Kebijakan ketenagakerjaan sebagai kebijakan ekonomi dan politik dikonsentrasikan pada pembangunan dan penggunaan tenaga kerja sebagai sumber daya ekonomi, sumber pendapatan, kesejahteraan individu dan keluarga (Poschen, P., 2009). Kebijakan penerapan kurikulum pendidikan kejuruan generasi *baby boomer* (1946-1964), generasi X (1965-1980), generasi Y atau generasi millenium (1981-1995) berbeda sesuai karakteristik generasinya.

Era tahun 2000-an disebut sebagai era generasi platinum yaitu era yang tumbuh setelah generasi millenium. Generasi platinum merupakan generasi yang tumbuh di era layar. Mereka berkembang lewat layar TV, monitor komputer, LCD Viewer melalui Komputer, VCD-DVD player, *Play Station* (PS), *Internet*, HP, MP-3, MP-4 dan sebagainya. Generasi platinum memiliki karakter yang menonjol dengan sifat ekspresif dan eksploratif. Lewat jejaring sosial Facebook dan Twitter generasi platinum mengekspresikan berbagai hal yang terjadi baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Dari segi kognitif, mereka cenderung berpikir logis dan mudah menyerap sesuatu hal yang baru seperti teknologi dan penguasaan bahasa asing, memiliki penguasaan pemahaman diri yang baik, mampu mengenali emosi atau perasaannya, bekerja dengan perangkat virtual, mampu melakukan berbagai observasi dengan berbagai metoda pendekatan sains dan sosial (*Kedaulatan Rakyat*, 16 Desember 2007).

Anak yang tumbuh di era platinum memiliki kemampuan dan peluang mengakses informasi secara bebas terbuka dalam waktu nyata sehingga memiliki peluang yang lebih besar dan lebih luas untuk mengembangkan diri, berpotensi lebih produktif, lebih nyaman, aman dan lebih berkualitas. Dukungan teknologi dalam sistem informasi memberi penguatan pengembangan diri anak era platinum. Pendidikan kejuruan di era generasi platinum membutuhkan kurikulum pendidikan kejuruan yang lebih konstruktif eksploratif berkelanjutan. Penggunaan komputer dan

sistem informasi dalam pembelajaran pendidikan kejuruan merupakan suatu keharusan di era platinum. Isi kurikulum pendidikan kejuruan menjembatani kesenjangan pewarisan artefak, proses teknik, ide-ide, kebiasaan, dan nilai-nilai baru.

Perkembangan teknologi dengan segala jenis artefak-nya merupakan hasil atau produk dari pendidikan kejuruan negara-negara industri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membangun budaya global dimana batas-batas negara, warna kulit, bahasa, umur tidak lagi bisa diatur dan dikelompok-kelompokan. Sejalan dengan prinsip-prinsip politik ekonomi maka negara berkembang dijadikan sebagai obyek pemasaran. Indonesia termasuk sasaran pasar potensial produk teknologi karena memiliki jumlah penduduk besar. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia memberi permasalahan baru dalam menghadapi kompetisi global.

Menurut ILO tujuan dari ekonomi global di era platinum (Glo-Plat) harus memberi peluang kepada semua orang menjadi produktif dalam suasana damai, berkeadilan, aman, dan bermartabat. Tujuan ini masih sebatas retorika yang perlu terus menerus dikampanyekan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan empat strategi yaitu: (1) penciptaan pekerjaan, (2) promosi hak-hak dasar bekerja, (3) pengembangan perlindungan sosial, (4) penguatan dialog sosial. Berlawanan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, daya saing menjadi ukuran "survive" atau tidaknya suatu negara. Kemampuan bersaing berkaitan dengan kemampuan manajemen, kepemimpinan, penggunaan dan penguasaan teknologi informasi (TI), dan kualitas SDM.

Diberlakukannya perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang berkembang menjadi *World Trade Organization* (WTO), dibentuknya blok-blok perdagangan regional seperti *European Common Market* (ECM) lalu menjadi *European Economics Community* (EEC), *North American Free Trade Area* (NAFTA), *Asean Free Trade Area* (AFTA), dan *Asia Pacific Economics Cooperation* (APEC) merupakan wujud nyata era perdagangan bebas, liberal, dan terbuka. Era perdagangan bebas membawa dampak ganda. Disatu sisi, era globalisasi membuka peluang kerjasama yang seluas-luasnya antar negara, namun

disisi lain harus diterima sebagai era persaingan yang semakin ketat dan tajam. Diprediksikan bahwa Jepang, Amerika Serikat, dan Cina yang paling banyak mengambil manfaat dari era perdagangan bebas. Bagi Indonesia meningkatkan daya saing dengan membentuk keunggulan kompetitif disemua sektor, baik sektor riil maupun jasa dengan mengandalkan kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen merupakan tantangan utama **(Pavlova, M., 2009)**.

Manusia sebagai sumber dari segala sumber yang berdaya tetap merupakan kunci utama kemampuan memenangkan persaingan pasar bebas. Persoalan yang dihadapi mutu SDM Indonesia saat ini masih tergolong rendah, tingkat pengangguran masih tinggi, karenanya pendidikan kejuruan dan training merupakan alternatif tepat dilaksanakan.

Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tertuang dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 3 dinyatakan untuk “meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruanannya”. Tujuan ini kemudian dirumuskan kedalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan menengah kejuruan. Lebih lanjut dalam lampiran Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 SKL SMK dirumuskan menjadi 23 item yaitu :

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja;
2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya;
3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya;
4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial;
5. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global;
6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif;
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan;
8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri;

9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik;
10. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks;
11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial;
12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab;
13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya;
15. Mengapresiasi karya seni dan budaya;
16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok;
17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan;
18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun;
19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat;
20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain;
21. Menunjukkan ketrampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis;
22. Menunjukkan ketrampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris;
23. Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruan-nya.

Tujuan pendidikan menengah kejuruan dan 23 SKL SMK merupakan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai siswa SMK sebagai pendidikan untuk dunia kerja. Kegiatan instruksional di SMK dikembangkan untuk membangun SKL pada setiap individu siswa. SKL nomor 1 sampai dengan 22 merupakan SKL generik berlaku secara umum bagi setiap lulusan SMK. Sedangkan SKL nomor 23 merupakan SKL spesifik per bidang/program keahlian sebagai penciri pendidikan untuk dunia kerja (*work-based-education*).

Masyarakat di abad 21 dihadapkan pada tantangan kebutuhan individu dengan kompleksitas tinggi dibanyak segi kehidupannya. Perubahan-perubahan yang semakin tidak menentu dengan laju yang semakin cepat merupakan bagian yang harus diakrabi oleh setiap individu. Perubahan tersebut berimplikasi langsung pada kebutuhan akan kompetensi-kompetensi kunci. *Definition and Selection of Competencies* (DeSeCo, 2003) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut “A competency is more than just knowledge and skills. It involves the ability to meet complex demands, by drawing on and mobilising psychosocial resources (including skills and attitudes) in a particular context”. Kompetensi tidak sekedar pengetahuan dan ketrampilan tetapi lebih dari itu. Kompetensi mencakup kemampuan memenuhi permintaan yang kompleks dengan menggunakan dan memobilisasi sumberdaya psikologis seperti ketrampilan dan sikap pada konteks yang tepat. The Northern Territory Public Sector Australia (2003) mendefinisikan “Competency as: The necessary knowledge and skills to perform a particular work role to the standard required within industry (<http://www.ncver.edu.au/>)

Kompetensi kunci adalah kompetensi untuk sebuah pekerjaan atau fungsi tertentu, tidaklah spesifik bagi pekerja tertentu atau industri tertentu, tetapi menopang kompetensi spesifik dari industri itu. Dalam aktivitas masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi, kompetensi kunci merupakan kompetensi penting yang memungkinkan seseorang dapat berkembang dan mampu beradaptasi pada perubahan yang bersifat lateral. Menurut rumusan dari berbagai Negara, kompetensi kunci mencakup aspek berikut:

1. *Communication in the mother tongue;*
2. *Communication in a foreign language;*
3. *Mathematical literacy and basic competences in science and technology ;*
4. *Digital competence;*
5. *Learning-to-learn ;*
6. *Interpersonal and civic competences;*
7. *Entrepreneurship; dan*
8. *Cultural expression.* (<http://www1.worldbank.org/>).

DeSeCO menfokuskan kompetensi-kompetensi individu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keterpaduan sosial.

Ditemukan sembilan kompetensi kunci yang cocok dengan semua orang di Negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan kemungkinan untuk ditransfer pada negara-negara berkembang yaitu:

1. *The ability to relate well to others;*
2. *The ability to co-operate;*
3. *The ability to manage and resolve conflict;*
4. *The ability to act within the 'big picture';*
5. *The ability to form and conduct life plans and personal projects;*
6. *The ability to defend and assert one's rights, interests, limits and needs;*
7. *The ability to used language, symbols and text interactively;*
8. *The ability to use knowledge and information interactively;*
9. *The ability to use (new) technology interactively.* (Chinién-Singh, 2009).

Terdapat tiga klasifikasi kompetensi kunci menurut DeSeCo (*Definition and Selection of Competencies*) yang relevan dengan negara-negara OECD yaitu: (1) berinteraksi sosial dalam kelompok heterogin menggunakan *tools* secara interaktif, berupa kebutuhan individu menggunakan *tools* secara luas untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan fisik dalam bentuk teknologi informasi dan dengan sosial budaya dalam menggunakan bahasa; (2) interaktif dalam kelompok yang heterogen, yaitu meningkatkan kemampuan individu agar dapat menyertakan orang lain dan kemampuan untuk melaksanakan pertemuan dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda atau jamak; (3) bertindak secara otonom, kemampuan untuk bertanggung jawab pada diri sendiri dalam situasi kehidupan dalam konteks sosial yang kompleks.

Perkembangan global telah membawa perubahan yang berdampak pada kesenjangan prestasi pendidikan antar wilayah. Kesenjangan diakibatkan oleh perbedaan bentuk-bentuk pengajaran dan penilaian versus apa sesungguhnya yang diperlukan anak didik untuk berhasil sebagai pembelajar, pekerja, dan masyarakat dalam *global knowledge economy* saat ini. Perubahan tersebut sangat kuat pengaruhnya sehingga diperlukan pemahaman dan *rethink* apa sesungguhnya yang dibutuhkan anak-anak muda kita di abad 21 dan bagaimana mereka berfikir terbaik bahwa masa depan mereka tetap tidak menentu tanpa

kepastian. Ketidakpastian adalah *demand driven* dunia kerja abad 21. Saatnya menentukan perubahan kebutuhan pendidikan masa depan “*back-to-basics*” dengan penguatan pada daya adaptabilitas dari “*Old World*” of classrooms in the “*New World*” of work.

Untuk memasuki “*New world of work*” pada abad 21 diperlukan tujuh *survival skill* (Wagner; 2008) yaitu: (1) *critical thinking and problem solving*; (2) *collaboration across networks and leading by influence*; (3) *agility and adaptability*; (4) *initiative and entrepreneurialism*; (5) *effective oral and written communication*; (6) *accessing and analyzing information*; dan (7) *curiosity and imagination*. Kemampuan bertanya yang baik disebut sebagai komponen dasar dari berfikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving*). Dalam dunia baru *knowledge-based economy* pekerjaan dinyatakan dengan tugas-tugas atau masalah atau tujuan akhir yang harus diselesaikan. Dengan demikian, *critical thinking and problem solving* merupakan kompetensi sangat penting dalam sebuah masyarakat industri. Pertanyaan yang baik adalah output dari *critical thinking* untuk *problem solving*.

Konsep kerja tim saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Teknologi telah menyediakan model *virtual teams*. *Virtual teams* bekerja dengan orang-orang diseluruh dunia dengan pemecahan masalah menggunakan *software*. Mereka tidak bekerja dalam ruang yang sama, tidak mendatangi kantor yang sama, setiap minggu melakukan *conference calls*, bekerja dengan *web-net meeting*. Tantangannya *virtual and global collaboration* adalah jaringan kerjasama (*network*). *Skillfulness of individual working with networks of people across boundaries and from different culture* merupakan kebutuhan esensial/mendasar sejumlah perusahaan multinasional. *Core competencies* nya adalah berfikir strategis.

Dalam *Partnership for 21<sup>st</sup> Century Skills* disetujui bahwa memahami dan mengapresiasi perbedaan budaya merupakan *core competencies* tambahan untuk semua kebutuhan lulusan *high school*. Kepedulian pada perubahan global menurut Wagner (2008) merujuk akan kebutuhan kemampuan siswa untuk:

1. Menggunakan 21<sup>st</sup> *century skills* (seperti kemampuan berfikir kritis dan pemecahan masalah) untuk memahami isu-isu global;
2. Belajar dari dan bekerja secara kolaboratif dengan individu berbeda budaya, agama, dan *lifestyles* dalam spirit kebutuhan bersama dan dialog terbuka dalam konteks bekerja dan berkomunikasi;
3. Memahami budaya negara-negara, termasuk penggunaan bahasa Inggris. Untuk bisa survive, diperlukan kemampuan yang fleksibel dan dapat beradaptasi sebagai *lifelong learner*;
4. Memahami kompetensi kunci yaitu kemampuan melakukan penangan secara ambigu, kemampuan mempelajari bagian-bagian inti dan mendasar, kecerdasan strategis.

Untuk mencapai sukses di abad 21 diperlukan *employability skills*. Para *stakeholder* telah menyadari betul akan pentingnya *employability* pada jenjang pendidikan tinggi. Yorke (2006) menyatakan “*the higher education system is subject to governmental steer, one form of which is to give an emphasis to the enhancement of the employability of new graduates*”. Little (2006) menyatakan para *stakeholder* menaruh perhatian bahwa pendidikan tinggi sebaiknya meningkatkan *employability skills* lulusan. Sementara itu, Raybould & Wilkins (2005) menyatakan “*universities must change their focus from producing graduates to fill existing jobs to producing graduates who can create new jobs in a dynamic growth sector of the economy*”.

Lankard (1990) mendefinisikan *employability skills* sebagai suatu ketrampilan yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk dapat tetap bekerja, meliputi *personal skills, interpersonal skills, attitudes, habits* dan *behaviors*. Overtoom (2000) mendefinisikan *employability skills* sebagai kelompok ketrampilan inti bersifat dapat ditransfer yang menggambarkan fungsi utama pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dibutuhkan tempat kerja di abad ke-21. Robinson (2000) menyatakan *employability skills* terdiri dari tiga kelompok ketrampilan yang meliputi: (1) *basic academic skills*, (2) *higher-order thinking skills*, dan (3) *personal qualities*.

*The Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills* (SCANS) mendefinisikan *employability skills* sebagai “*workplace know-how*” yang meliputi *workplace competencies* dan *foundations*

*skills* (SCANS, 1991). *Workplace competencies* terdiri dari lima yang dapat digunakan oleh pekerja secara efektif dalam meningkatkan produktivitas meliputi: (1) *Resources* (sumberdaya); (2) *Interpersonal skills* (ketrampilan interpersonal); (3) *Information* (informasi); (4) *Systems* (sistem); dan (5) *Technology* (teknologi). Sementara itu, *foundation skills* dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja para pekerja, meliputi: (1) *Basic skills* (ketrampilan dasar); (2) *Thinking skills* (ketrampilan berfikir); dan (3) *Personal qualities* (kualitas individu).

*The Conference Board of Canada* (2000) mendefinisikan *employability skills* sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketrampilan dan kualitas individu yang dikehendaki oleh pemberi kerja terhadap pekerja baru apabila mereka mulai bekerja. *Employability skills* dilihat dari tiga elemen ketrampilan utama, yaitu (1) *Fundamentals Skills*, yang meliputi: ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan mengelola informasi, ketrampilan matematik dan ketrampilan menyelesaikan masalah; (2) *Personal Management Skills*, yang meliputi: ketrampilan dalam bersikap dan berperilaku positif, ketrampilan bertanggungjawab, ketrampilan dalam beradaptasi, ketrampilan belajar berkelanjutan dan ketrampilan bekerja secara aman; (3) *Teamwork Skills*, yang meliputi: ketrampilan dalam bekerja dengan orang lain dalam suatu tim dan ketrampilan berpartisipasi dalam suatu proyek atau tugas.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *employability skills* merupakan sekumpulan ketrampilan-ketrampilan non-teknis bersifat dapat ditransfer yang relevan untuk memasuki dunia kerja, untuk tetap bertahan dan mengembangkan karir di tempat kerja, ataupun untuk pengembangan karir di tempat kerja baru. Ketrampilan-ketrampilan tersebut termasuk diantaranya: ketrampilan personal, ketrampilan interpersonal, sikap, kebiasaan, perilaku, ketrampilan akademik dasar, ketrampilan berfikir tingkat tinggi.

Pendidikan sepanjang hayat berlangsung secara simultan terpadu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama terjadi proses pengenalan nilai-nilai dan penanaman nilai-nilai. Pengenalan nilai berlangsung jauh sebelum anak mengenal sekolah dan berjalan terus-menerus sepanjang hayat.

Lingkungan keluarga bagi individu belajar sangat penting artinya dalam penumbuhan kepribadian. Lingkungan keluarga merupakan lahan pertama dan pengawal terbentuknya perilaku normatif yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, lingkungan keluarga harus menjadi andalan bagi pengakraban antara anak dengan nilai-nilai yang diunggulkan sebagai acuan perilaku, baik nilai-nilai yang bersifat preservatif maupun progresif. Jadi, setiap orang tua berhak dan berkewajiban atas pendidikan anaknya (Slamet PH, 2008).

Selain sekolah dan keluarga, pengaruh dan peran masyarakat terhadap pendidikan kejuruan sangat penting. Masyarakat, menurut Slamet PH (2008) memiliki aset berharga bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional terlebih sistem pendidikan kejuruan. Aset masyarakat terhadap pendidikan dapat berbentuk modal intelektual, moral, finansial, maupun material. Jenis masyarakat sangat beragam dapat dikelompokkan menjadi: orang tua siswa, keluarga, warga banjar, warga desa, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, praktisi, akademisi, dunia usaha dan industri. Finlay (1998) menyebut kelompok-kelompok masyarakat itu dengan istilah *stakeholder*. Dia mengelompokkan masyarakat pendidikan kejuruan menjadi: (1) *institutional stakeholder*; (2) *individual stakeholder*; (3) *employer stakeholder*.

Kemitraan pendidikan menengah kejuruan sangat vital fungsinya. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di era otonomi daerah menuntut dilakukannya pembentukan kemitraan secara terencana, sistematis, dan intensif meliputi advokasi, partisipasi, kontekstualisasi, demokratisasi, publikasi, komunikasi, transparansi, dan relasi dengan masyarakat. Slamet PH (2008) menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan memerlukan *new habits of mind and heart*. Desentralisasi pendidikan memerlukan sistem/struktur, kultur, dan figur (pelaku) yang berbeda dengan sentralisasi sehingga perlu dilakukan restrukturisasi, rekulturasasi, dan refigurasi. Restrukturisasi adalah proses pelebagaan keyakinan, nilai dan norma baru tentang tugas dan fungsi dasar, struktur organisasi, kewenangan, dan tanggungjawab sesuai dengan tuntutan desentralisasi pendidikan. Rekulturasasi adalah pembudayaan perilaku seseorang/kelompok terhadap keyakinan, nilai dan norma baru yang

dituntut oleh desentralisasi pendidikan. Refigurasi adalah proses penataan kembali figur (pelaku) pendidikan agar memperoleh *the right person in the right place* sesuai dengan tuntutan desentralisasi pendidikan. Penataan figur atau pelaku-pelaku yang memiliki kapasitas dan sesuai dengan tuntutan desentralisasi pendidikan merupakan tantangan pokok.

Esensi desentralisasi pendidikan menurut Slamet PH (2008) adalah daerah otonom (pemerintah daerah) memiliki tugas dan fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus persoalan pendidikan kejuruannya sendiri. Kemandirian memerlukan upaya-upaya serius melalui penyiapan kemampuan dan kesanggupan daerah, terutama kemampuan dan kesanggupan kelembagaan dan sumberdaya manusianya.

Otonomi daerah menurut Tilaar (2002:77) diartikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat lokal dalam mengatur urusannya sendiri. Otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembentukan masyarakat telematika di daerah. Proses globalisasi juga mengikutsertakan daerah dalam kehidupan global. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah dapat menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber-sumber daya selebihnya. Daerahlah yang paling mengetahui sumberdaya daerahnya dan bagaimana mengelola untuk kebahagiaan daerah itu sendiri.

Kemandirian yang dimaksudkan menurut Slamet PH (2008) tetap dalam koridor kebijakan nasional karena Indonesia adalah Negara kesatuan. Kebhinekaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dijamin penuh, akan tetapi harus tetap dalam jalur-jalur kebijakan pendidikan nasional. Inilah esensi desentralisasi pendidikan di Indonesia yang tidak sama dengan model-model desentralisasi yang dianut oleh negara-negara yang berfaham federal. Desentralisasi tidak bersifat monolitik nomotetik tetapi cenderung bersifat ideografik karena model desentralisasi yang berhasil dikembangkan di suatu negara tidak ada jaminan berhasil diterapkan di negara lain.

Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan untuk pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Selain itu desentralisasi pendidikan juga ditujukan untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang berlebihan, mengurangi kemacetan-kemacetan jalur-jalur komunikasi, meningkatkan kemandirian, demokrasi, daya tanggap, akuntabilitas, kreativitas, inovasi, prakarsa, dan meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan (Slamet PH, 2008). Implikasi klasik dari desentralisasi pendidikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah tuntutan penguatan kemandirian dalam peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan kejuruan. Agar desentralisasi pendidikan dapat berjalan lancar, diperlukan kesiapan yang memadai mengenai kapasitas pada tingkat makro, kapasitas kelembagaan, peran aktif masyarakat, kesiapan sumberdaya, budaya/kultur yang kondusif bagi penyelenggaraan desentralisasi pendidikan.

Dalam era desentralisasi, sumberdaya manusia “pemimpin” sangat diperlukan karena pergeseran paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi berkaitan dengan perubahan. Perubahan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sering dimaknai berkonotasi negatif sehingga otonomi dipandang sebagai ancaman, ketidak pastian, ketakutan, kehilangan, bahaya, panik, resiko tinggi, ada eskalasi konflik sosial yang menimbulkan emosi. Disinilah kepemimpinan yang cerdas, piawai, dan tangguh sangat diperlukan kehadirannya.

Menghadapi proses desentralisasi pemimpin yang diharapkan hadir adalah pemimpin yang visioner/transformatif yang memiliki kapasitas dalam: (1) merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pendidikan menengah kejuruan yang jelas dan ditulis lalu dipublikasikan, diartikulasi keseluruhan *stakeholder* pendidikan menengah kejuruan; (2) memiliki keyakinan bahwa unit-unit kerja pendidikan adalah tempat untuk bekerja dan belajar secara nyaman, bermakna, dan menyenangkan; (3) menghargai martabat manusia pengikutnya yang dibuktikan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai inti kemanusiaan seperti: hak asasi manusia, kedamaian, demokrasi, solidaritas/kebersamaan, cinta kasih, keharmonisan, keadilan, kesopanan, tanpa kekerasan; (4) memberdayakan warga unit-unit pendidikan yang dibuktikan

oleh upaya-upaya nyata dalam peningkatan kemampuan dan kesanggupan kerja mereka, pemberian kewenangan dan tanggungjawab, pemberian pekerjaan yang bermakna dan menantang, pemberian kepercayaan kepada bawahan, dan memfasilitasi bawahan sebagai orang yang harus belajar terus, dan (5) berpikir, berkata, dan bertindak secara proaktif, komunikatif, berjiwa wirausaha, dan berani mengambil resiko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Billett, S. (2009). Changing Work, Work Practice: The Consequences for Vocational Education. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 175-188). Germany: Springer.
- Billett, S. (2009). Vocational Learning: Contributions of Workplaces and Educational Institutions. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1711-1724). Germany: Springer.
- Boreham, N. & Fischer, M. (2009). The Mutual Shaping of Work, Vocational Competence and Work-Process Knowledge. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1593-1610). Germany: Springer.
- Boud, D. & Solomon, N. (2003). *Work-based Learning a New Higher Education?*. USA:SRHE and Open University.
- Boutin, F., Chinien, C., Moratis, L., Baalen, P.V. (2009). Overview: Changing Economic Environment and Workplace Requirements: Implications for Re-Engineering TVET for Prosperity. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 81-96). Germany: Springer.

- Briggs, C.L. (2007). Anthropology, Interviewing, and Communicability in Contemporary Society. *Current Anthropology*, vol. 48, No. 4.
- Brown,A., Bimrose,J., Barnes,S.A. (2009). Collaborative Work-Related Learning and Technology- Enhanced Learning. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1155-1174). Germany: Springer.
- Browne. R.K. & Lamb. A. (2000). *Linking Theory to Practice in the Workplace*. London : AERC Proceeding.
- Burke,G. & Smith,C.S. (2009). Economic Perspectives on Technical and Vocational Education and Training in Australia. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1155-1174). Germany: Springer.
- Chadd, .J. & Anderson, M.A. (2005). Illinois Work-Based Learning Programs: Worksite Mentor Knowledge and Training. *Jurnal Career and Technical Education Research*, Volume 30 number 1.
- Chang, H. G. (2009). The Reform of the TVET System in the Republic of Korea for an Ageing Society. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 2431-2444). Germany: Springer.
- Cheng, Y.C. (2005). *New Paradigm for Re-engineering Education, Globalization, Localization and Individualization*. Netherland: Springer
- Chinien, C. and Singh, M. (2009). Overview: Adult Education for the Sustainability of Human Kind. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 2521-2536). Germany: Springer.

- Chinien, C. Boutin, F., Plane, K. (2009). The Challenge for ESD in TVET: Developing Core Sustainable Development Competencies and Collaborative Social Partnerships for Practice (2553-2570). In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 2553-2570). Germany: Springer.
- Clarke, L. & Winch, C. (2007). *Vocational Education International Approaches, development and systems*. New York: Routledge.
- Deitmer, L. & Heinemann, L. (2009). TVET and R&D Evaluation: The Potential for Optimizing TVET. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1521-1534). Germany: Springer.
- Deseco. (2005). *Defining and Selecting Key Competencies*. Diambil pada tanggal 16 Agustus 2008 dari: [www.Oecd.Org/Edu/Statistics/Deseco](http://www.Oecd.Org/Edu/Statistics/Deseco)
- Djohar, (1999). *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan Di Indonesia*. Yogyakarta: IKIP Negeri Yogyakarta.
- Emmerik, I.J. H. V., Bakker A.B, & Euwema M.C. (2009). Explaining employees' evaluations of organizational change with the job-demands resources model, *Career Development International Journal*, Vol. 14 No. 6, 2009. 594-613.
- Finch & Crunkilton. (1999). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education, Planning, Content, and Implementation*. United State of America : Allyn & Bacon A Viacom Company.
- Finlay, I., Niven, S.,& Young, S. (1998). *Changing Vocational Education and Training an International Comparative Perspective*. London: Routledge.
- Gagnon, R. (2009). Competency, Meaningful Learning and Learning Style in TVET (2697-2712). In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging*

- Academic and Vocational Learning* (pp. 203-208). Germany: Springer.
- Gill, I.S., Fluitman, F., & Dar, A. (2000). *Vocational Education and Training Reform, Matching Skills to Markets and Budgets*. Washington: Oxford University Press.
- Grath, S.M. (2009). Reforming Skills Development, Transforming the Nation: South African Education and Training Reform. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1994-2005). Germany: Springer.
- Grubb, W.N. & Lazerson, M. (2009). The Education Gospel and Vocationalism in an International Perspective: The promises and the Limits of Formal Schooling. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1791-1804). Germany: Springer.
- Hadiwaratama (2005). *Pendidikan Kejuruan, Investasi Membangun Manusia Produktif*. Diunduh tanggal 24 Septemebr 2008, dari <http://digilib.polman-bandung.ac.id/index.php?subject=%22Pendidikan%22&search=Search&page=2>.
- Heinz .W.R (2009). Redefining the Status of Occupations. In J. A. Athanasou , R. V. Esbroeck. *International Handbook of Career Guidance*. Springer Science Business Media B.V.
- Heisig, U. (2009). The Deskillling and Upskilling Debate. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1639-1652). Germany: Springer.
- Herschbach, D.R. (2009) Overview: Navigating the Policy Landscape: Education, Training and Work. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 869-890). Germany: Springer.

- Herschbach, D.R. (2009) Planning for Education and Work. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 939-962). Germany: Springer.
- Hiniker, L.A. and Putnam, R.A. (2009). Partnering to Meet the Needs of a Changing Workplace (203-208). In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 203-208). Germany: Springer.
- Hochwarter, W.A. and Rogers, L.M., Summers J.K., Meurs, J.A. (2009). Personal control antidotes to the strain consequences of generational conflict as a stressor A two-study constructive replication and extension, *Career Development International* Vol. 14 No. 5, 2009 pp. 465-486 Emerald Group Publishing Limited.
- Hollander A. & Mar N.Y (2009) Towards Achieving TVET for All: The Role of the UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 41-57). Germany: Springer.
- Huisinga, R. (2009). Approaches to Designing TVET Curricula. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1669-1686). Germany: Springer.
- Kellett, J.B., Humphrey R.H., and Sleeth, R.G. (2009) Career development, collective efficacy, and individual task performance, *Career Development International* Vol. 14 No. 6, 2009 pp. 534-546 q Emerald Group Publishing Limited 1362-0436.
- Kotsik, B., Tokareva, N., Boutin, F., Chinien, C. (2009). ICT Application in TVET. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the*

- Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1879-1894). Germany: Springer.
- Lankard, Bettina, A. (1990). *Employability--The fifth basic skill*. ERIC Digest No. 104. Diakses 1 April 2008 dari <http://www.ericdigests.org/pre-9217/fifth.htm>.
- MacKenzie, J. & Polvere, R.A. (2009). TVET Glossary: Some Key Terms. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 59-80). Germany: Springer.
- Maclean, R., Wilson, D.N. (2009). Introduction. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. xxiii-cxii). Germany: Springer.
- McGrath, S. (2009) Reforming Skills Development, Transforming the Nation: South African Vocational Education and Training Reforms. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1994–2005). Germany: Springer.
- McKeown, R. (2002). *Education for sustainable development Toolkit*. USA: Center for Geography and Environmental Education.
- Mulder, M., Weigel, T., Collins, K. (2007). The concept of competence in the development of vocational education and training in selected EU member states: a critical analysis. *Journal of Vocational Education & Training*, Mar 2007, Vol. 59 Issue 1, pp. 67-88.
- OECD. (2005). *The definition and selection of key competencies (DeSeCo): Executive summary*. Diakses pada tanggal 14 Juli 2008 dari <http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/47/6135070367.pdf>
- Oketch, M. O. (2009). To Vocationalize or Not to Vocationalize? Perspectives on Current Trends and Issues on TVET in Africa. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing*

- World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 531-546). Germany: Springer.
- Oketch, M. O., Green, A., & Preston, J. (2009). Trends and Issues in TVET across the Globe. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 2081-2094). Germany: Springer.
- Overtom, Christine. (2000). *Employability skills: An update*. ERIC Digest No. 220. Columbus, Ohio: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education. Diakses 12 Juli 2008 dari <http://www.ericdigests.org/2001-2/skills.htm>.
- Pavlova M. (2009). *The Vocationalization of Secondary Education: The Relationships between Vocational and Technology Education*. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1805-1822). Germany: Springer.
- Pavlova, M. & Munjanganja, L.E. (2009) *Changing Workplace Requirements: Implications for Education*. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1805-1822). Germany: Springer.
- Poschen, P. (2009). Decent Work for All: From ILO Initiative to a Global Goal. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 111-128). Germany: Springer.
- Raelin, J.A. (2008). *Work-Based Learning new and revised edition*. San Francisco: Jossey Bass.
- Robinson, J. Shane. (2006). *Graduates' and employers' perceptions of entry-level employability skills needed by agricultural, food and natural resources graduates*. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Missouri, Columbia.
- Robinson, Jacquelyn P. (2000). What are employability skills?. *The Workplace*, 1(3).

- Robinson, Linda L. (2005). *Developing Employability Skills for Malaspina University-College Students*. Master's Thesis (unpublished). Royal Roads University, Ottawa, Kanada.
- Roger Harris, Michele Simons, Julian Moore. (1997) 'A huge learning curve': *TAFE practitioners' ways of working with private enterprises*. Adelaide: Education Research Ltd. [www.ncver.edu.au](http://www.ncver.edu.au)
- Rojewski. J.W (2009). A Conceptual Framework for Technical and Vocational Education and Training. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 19-40). Germany: Springer.
- Rychen, D.S.(2009). Key Competencies: Overall Goals for Competence Development: An International and Interdisciplinary Perspective. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 2571-2584). Germany: Springer.
- Singh M. (2009). Overview: Education and Training in the Informal Sector. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 235-244). Germany: Springer.
- Singh M. (2009). Social and Cultural Aspects of Informal Sector Learning: Meeting the Goals of EFA. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 349-364). Germany: Springer.
- Slamet PH., (2006). *MBS, Life Skill, KBK, CTL dan Salingketerkaitannya*. Jakarta: Depdiknas.
- Strom, B.T. (1996). *The Role of Philosophy in Education-for-Work*, Journal of Industrial Teacher Education Volume 33 number 2.
- Tauhid Bashori. *Pragmatisme Pendidikan (Telaah atas Pemikiran John Dewey)*

- Tessaring, M. (2009). Anticipation of Skill Requirements: European Activities and Approaches. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 147-160). Germany: Springer.
- Thompson, John F, (1973). *Foundation of Vocational Education Social and Philosophical Concepts*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Tilaar, H.A.R., (1999). *Pendidikan Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R., (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wagner, T. (2008). *The Global Achievement Gap*. New York: Basic Books.
- Wardiman Djojonegoro. (1998). *Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui SMK*. Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset.
- Workkeys. (2003). *Workkeys and Dacum: Working Together*. Iowa: [www.act.org/workkeys](http://www.act.org/workkeys) and [www.cnm.edu/workkeys\\_dacum.pdf](http://www.cnm.edu/workkeys_dacum.pdf)

## TENTANG PENULIS



**Dr. Putu Sudira,MP.** Lahir di Desa Nagasepaha Singaraja Bali pada hari Kamis Wage Toulu, 2 April 1964. Merupakan anak ke empat dari enam bersaudara. Sejak kecil sangat tertarik mengikuti pendidikan teknologi kejuruan. Perjalanan pendidikan kejuruannya dimulai dari masuk STM N Denpasar pada jurusan Elektronika. Pada tahun 1982 mendapat beasiswa pengadaan guru STM dari Dikmenjur pada Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika di FPTK IKIP Yogyakarta. Setelah lulus S-1 pada FPTK IKIP Yogyakarta dipercaya mengabdikan sebagai dosen pada Jurusan tempat menempuh S-1 sampai sekarang. Pada tahun 1997 memperoleh master teknik pertanian di UGM dengan predikat Cumlaude. Lalu pada tahun 2011 memperoleh gelar Doktor Cumlaude dalam bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di PPs UNY. Pada tahun 2009 mengikuti program sandwich di OHIO State University Columbus Amerika Serikat. Disamping aktif sebagai konsultan pendidikan kejuruan pada Direktorat Pembinaan SMK, saat ini ditugasi sebagai sekretaris dan dosen Prodi S-2 dan S-3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan PPs UNY.

## INDEK

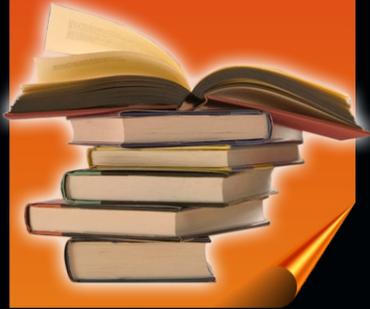
- adult education 6-64
- agen pendidikan kejuruan 11
- agen perubahan 25
- akulturasi 31-48-66
- Allen 48-50
- Amerika serikat 2-4-5-8-21-50
- asosiasi profesi 9-11-17-79
- asosiasi vokasi 15
- attitudes 15-73-77
- bakat 10
- basic skill 77
- behavior 77
- berbasis produktif 17
- berlatih ketrampilan 35-36
- biaya tinggi 35-41-51
- bimbingan kejuruan 1-2
- budaya global 25-48-69
- budaya lokal 48
- budaya masyarakat 30
- budaya wirausaha 9
- career and technical education 5-21
- career centre 5
- critical thinking 75
- demand driven 26-34-43-75
- demokratis 33-71
- DeSeCo 72-74
- Desentralisasi 79-80-81-82
- Dewey 18-20-21-48
- diklat 10-15-31-40-49
- Dual system 50
- DU-DI 27-37-38-39-49,53
- dunia kerja 6-9-10-13-16-33-74-78
- education-for-work 18-22-24-25-64
- efektif 13-18-22
- efisien 6-13-28-33-47-48-78
- eksistensi manusia 28
- eksistensialisme 18-19-24
- elektronika digital 38
- employability skills 76-77-78
- enkulturasi 32-48
- esensialisme 18-24-28
- FET 6
- Filosofi 3-21-22
- filosofi pragmatisme 22-24
- guru 9-12-14-35
- habits 15-17-77
- hands on experience 35
- hard skill 15
- humanisme 18-25-26
- ICT 38
- Idealisme 18
- ikatan alumni 12
- industri 1-2-4-8-9-11-17-18
- instruktur 9-35-66
- instrumen kebijakan 68
- instrumentalisme 20
- interpersonal skills 77
- investasi ekonomi 34
- investasi luar negeri 12-32
- jabatan 7-11-12-21-28-36-46-49-54

- jiwa wirausaha 82
- jumlah lulusan 27
- juru gambar 54-56
- karir 1-5-6-7-15-16-64
- kebutuhan masyarakat 20-24-31-40
- kecakapan 15-16
- kecerdasan spiritual 25-26
- kerjasama 9-13-27-29-30-41-63-70
- kesiapan kerja 35
- ketrampilan 6-7-8-9-11-12-15-16-77
- keunggulan lokal 47
- kompetensi kejuruan 1-37-39
- kompetensi kerja 6-16-38-44
- kompetensi produktif 27
- kompetensi teknis 4-5-9-44
- komputer 4-5-10
- kreatif 4-9-15-24-71
- kunci sukses pendidikan kejuruan 33
- kurikulum 11-24-27-28-38-53-69
- lapangan kerja baru
- layanan sosial 40-49
- learning by doing 27-35
- learning process 22
- life skills 16
- lingkungan pendidikan kejuruan 14
- lintas budaya 5-28
- lintas negara 28
- lulusan 6-13-14-16-27-39-51
- magang 52
- MAK 7-8-13
- market driven 43
- marketable 45
- memanusiakan manusia 26-32
- minat 10-36
- moralitas 20-25
- NCVER 7
- OECD 74
- operator 54-55-56
- otonomi daerah 79-80
- outcome 21
- pariwisata 40-45-46-54-60
- partisipasi masyarakat 80
- pasilitas mutakhir 39
- pelatihan baru 9
- pelatihan non formal 12
- peluang kerja 11-27-63
- pencari kerja 12-14-15-32
- pendidikan kejuruan 2-3-5-6-7-9-12
- pendidikan teknik
- pendidikan teknologi 17-65
- pendidikan vokasi 2-3-4-5-26-27-30
- pengentasan pengangguran 44
- pengetahuan praktis 17
- pengguna pendidikan kejuruan 14
- peningkatan skill 12
- perikanan 4-56-61
- perkebunan 4-44
- personal growth 18-19
- personal skills 77
- pertumbuhan tenaga kerja 42
- perubahan ekonomi 74
- peternakan 4-45-60
- PLC 55
- politik 28-29-30-48-68
- pragmatisme 18-20-22-21-22-23-24
- prakerin 52-53
- problem solving 75
- problem-based-learning

professional 7-20-37-40-45  
Prosser 33-48-50  
PSG 51-52  
Psikomotorik 36  
realisme 18  
rekonstruksi radikal  
relevansi 2-9-26-34-81  
rumah budaya 48  
school-based-entreprise 52  
sertifikasi 27-37-66  
SMK 7-8-12-14-46-50-51-52-  
66-72  
soft skill 1-15  
stakeholder 30-76-79-82  
sumber daya insan 6-12  
supervisi 9-10-11  
supplay driven 34-43  
TAFE 50  
teamwork skill 78  
tech-prep 24  
teknologi informasi 50-54-58-  
69-74  
tenaga kerja 7-14-24-27-32-33-  
34-42=44-47-66-67  
to fit 7-8-13-14  
to prepare 10-13-14  
training 6-7-8-10-12-13-42-  
44-66  
transformasi 21-65  
VET 7  
vocational and technical  
education 5  
vokasionalisasi 1  
VTET 6  
wirausaha 9-27-43-57-60-61-  
72-82  
work-based-education 72

# Filosofi & Teori Pendidikan

## Vokasi dan Kejuruan



Dr. Putu Sudira, MP.

Kebutuhan akan teori-teori dan filosofi pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia semakin terasa dengan semakin berkembangnya studi pascasarjana pendidikan teknologi kejuruan di beberapa daerah di Indonesia. Teori-teori dan filosofi pendidikan kejuruan dan vokasi sangat penting bagi pengembangan ilmu pendidikan kejuruan dimasa depan. Dengan adanya teori dan filosofi yang memadai, maka pengembangan kajian pendidikan kejuruan dan vokasi akan semakin terarah. Akhirnya praktik-praktik pendidikan vokasi dan kejuruan juga diharapkan menjadi semakin baik, benar, wajar, dan sesuai sasaran.

Buku ini disusun untuk memenuhi harapan para mahasiswa dan guru pendidikan kejuruan dan vokasi dalam memandang dan mempersepsikan proses vokasionalisasi di Indonesia. Harapannya setelah membaca buku ini, mereka dapat membangun pandangan baru yang lebih “clear” terhadap proses vokasionalisasi yang seharusnya terjadi di Indonesia. Buku ini disusun dalam 5 bab yaitu: Bab I tentang vokasionalisasi dan definisi pendidikan kejuruan dan vokasi; Bab II tentang filosofi pendidikan vokasi dan kejuruan; Bab III tentang teori pendidikan vokasi dan kejuruan; Bab IV tentang asumsi-asumsi pendidikan vokasi dan kejuruan; Bab V tentang praktik pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia. Semoga buku kecil dapat menginspirasi dan memberi wawasan serta manfaat baru bagi pembaca.



Jl. H. Affandi (Jl. Gejayan),  
Gg. Alamanda, Kompleks FT-UNY  
Kampus Karangmalang, Yogyakarta,  
Kode Pos: 55281  
Telp. (0274) 589346,  
redaksi.unypress@gmail.com  
cetak.unypress@gmail.com